

**PEMIKIRAN H. ABDUL KARIM OEY TJENG HIEN
TENTANG PEMBAURAN MINORITAS TIONGHOA
DI INDONESIA**



**Tesis
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Akademik
Guna Memperoleh Gelar Magister Humaniora (M.Hum.)
Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Konsentrasi Islam di Indonesia**

Oleh :

**Y A N T O
NIM. 030301074**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2008**

Bab 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Keberadaan minoritas Tionghoa¹ yang pertama kali di Nusantara sebenarnya tidak jelas. Dugaan selama ini hanya berdasarkan hasil temuan benda-benda kuno seperti tembikar Tiongkok di Jawa Barat, Lampung, daerah Batanghari dan Kalimantan Barat maupun yang disimpan di berbagai Kraton dan genderang (genta) perunggu Dongson di Jawa, Bali dan dataran Pasemah, Sumatera Selatan. Menurut Wolters sebagaimana dikutip Nugroho dalam buku "Sejarah Nasional Indonesia Jilid II" menyatakan bahwa bukti-bukti menunjukkan bahwa pelayaran niaga melintasi Laut Cina Selatan untuk pertama kalinya terjadi antara abad III dan abad V Masehi. Tetapi bukti pasti mengenai pelayaran antara Indonesia dan Cina berasal dari abad V Masehi. Hal ini membuktikan bahwa hubungan

¹ Sebenarnya di Indonesia berkembang 3 (tiga) istilah yakni Tionghoa, Tiongkok dan Cina. Istilah "Tionghoa" adalah transliterasi dari bahasa Mandarin "*Zhong Hua*". Dan istilah Tiongkok adalah istilah yang dipakai bangsa China untuk menyebut nama negara mereka transliterasi dari kata "*Zhong Guo*" artinya Negara tengah dunia. Sedangkan Istilah Cina terjemahan bahasa Inggris China secara etimologi berasal dari kata Qin yaitu nama Dinasti yang pada tahun 221 SM untuk pertama kalinya mempersatukan bangsa Cina. Bila dilihat dari perspektif bahasa, istilah Cina adalah istilah yang netral, namun dalam perkembangannya mengandung arti yang buruk. Sehingga istilah ini menjadi bahan perdebatan dan polemik yang berkepanjangan. Ketiga istilah ini sering digunakan dan berkembang di Indonesia dan yang menarik lagi adalah bahwa istilah "Tionghoa" ini sangat khas di Indonesia. Untuk mempertegas posisi penulis dalam menggunakan ketiga istilah tersebut maka penulis menggunakan istilah Tionghoa dengan beberapa alasan yang akan dikemukakan pada definisi operasional. Dalam kajian ini secara konsisten penulis akan menggunakan istilah Tionghoa untuk menyebut komunitas yang lama menetap di Indonesia dan istilah Tiongkok untuk menyebut asal Negara mereka serta di beberapa tempat juga akan digunakan kata Cina berdasarkan kutipan. (Williams, hlm.61 dan lihat pula Coppel 2002, hlm.372).

bangsa Tiongkok dengan Indonesia telah terjalin sejak zaman Sriwijaya abad 6 – 8 Masehi (Nugroho dkk, 1984, hlm.15)².

Orang-orang Tionghoa mulai berdatangan ke Indonesia pada abad ke IX yaitu pada zaman Dinasti Tang abad 618 M - 906 M dengan tujuan untuk berdagang dengan membawa barang-barang kerajinan seperti barang-barang porselen, sutera, teh, alat-alat pertukangan, pertanian dan sebagainya. Kemudian ditukar dengan hasil-hasil pertanian terutama rempah-rempah, sarang burung walet, gambir, bahan obat-obatan dan sebagainya. Mereka yang sebelumnya hanya menunggu pedagang-pedagang asing yang datang ke Canton dengan menggunakan kapal-kapal Persia kemudian tertarik untuk melakukan perdagangan sendiri ke negara-negara Laut Selatan (Nanyang) (wikipedia.com, lihat pula Puspongoro dkk, 1984, hlm.20).

Interaksi antara orang Tionghoa dengan masyarakat pribumi berlangsung selama berabad-abad berjalan secara natur, mereka hidup membaaur dan membawa kebudayaan baru serta mereka turut pula berjasa dalam mentransformasikan sejumlah teknik dalam kehidupan sehari-hari yang kini melebur, dikembangkan dan menjadi identitas masyarakat setempat. Sehingga unsur-unsur Tionghoa melebur dengan unsur-unsur masyarakat setempat. Orang Tionghoa hidup dengan berdagang, bertani, dan menjadi tukang. Hubungan yang harmonis antara orang Tionghoa dengan pribumi sebagaimana digambarkan Ben Anderson dengan istilah “*peaceful coexistence* dan *social prejudice*”

² Fa Hian seorang pendeta dari Tiongkok mengunjungi pulau Jawa dalam perjalanannya ke India antara tahun 399 sampai 414. Pengalamannya di tulis dalam buku Fahuek, seratus tahun kemudian Sun Yun dan Hwui Ning mengikutinya dengan melakukan ziarah dari Tiongkok ke India. Pada tahun 671 Pendeta I-tsing berangkat dari Canton ke Nalanda melalui Sriwijaya. Seluruh pengalamannya diuraikan dengan cermat dalam bukunya *Nan Hai Chi Kuei Fa Chuan* dan *Ta Tang Si Yu Ku Fa Kao Seng Chuan*. Pendeta I-Tsing mengembara di luar Tiongkok selama 25 tahun. Ia kembali ke Kwangtung pada pertengahan musim panas pemerintahan Cheng Heng (tahun 695) dengan membawa pulang 4.000 naskah yang terdiri dari lima ratus ribu sloka. Dari tahun 700 sampai 712 ia menterjemahkan 56 buku dalam 230 jilid. Hingga abad ke VII hanya pendeta Buddha Tionghoa yang melakukan perjalanan ke India yang mengunjungi Sriwijaya (Nugroho dkk 1984, hlm.15).

yaitu kondisi kehidupan beragama dan suku-suku bangsa di Nusantara berlangsung harmonis dan tanpa adanya prasangka sosial (Nugroho dkk, 1984, hlm.21, Lihat Riadi 2003, indodiges.com).

Bila melihat fakta sejarah di atas sebenarnya orang Tionghoa sebagai minoritas telah membaaur dengan penduduk pribumi, namun pada kenyataannya permasalahan minoritas Tionghoa di Indonesia hingga kini terus terjadi. Menurut Ben Anderson, hubungan harmonis minoritas Tionghoa dan pribumi tersebut menjadi hancur tatkala kolonial Belanda datang dan menjajah Nusantara, kemudian menjalankan politik *divide et impera* dan *rule* serta penerapan *Pass and Zoning System*. Pendapat Ben Anderson tersebut diperkuat oleh pernyataan Benny yang menyatakan bahwa jauh sebelum *Cornelis Houtman* datang ke Banten pada 23 Juni 1596, harmonisasi antara orang Tionghoa dengan penduduk dan penguasa setempat telah tercipta dengan baik, namun hubungan yang harmonis tersebut hancur ketika Belanda mulai menjajah. Menurut catatan Siaw Tiong Djin (1998) menyatakan bahwa sistem yang diterapkan penjajah Belanda dari tahun 1863 hingga 1930-an itu memaksa orang-orang Tionghoa untuk tinggal dan beraktivitas di daerah yang dihuni oleh golongannya saja (indodigest.com).

Menurut Lombard ada tiga peristiwa penting sebagai faktor yang sangat mempengaruhi mandegnya proses pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia ; *Pertama* memburuknya situasi perekonomian Tiongkok di penghujung kekuasaan Dinasti Qing pada akhir abad 19 yang menyebabkan terjadinya imigrasi besar-besaran orang Tionghoa gelombang kedua ke Indonesia dan bisa dipahami jika meningkatnya jumlah masyarakat Tionghoa serta pengelompokkan suku bangsa yang dilakukan Belanda meningkatkan kesadaran akan identitas mereka sebagai kelompok tersendiri. Di lain pihak kehadiran mereka pun tidak diterima baik oleh masyarakat setempat. Selain itu penjajah Belanda

memberikan keleluasaan kepada orang Tionghoa untuk mengembangkan kebudayaan mereka sendiri sebagai suatu bangsa, kelenteng tumbuh di mana-mana menjadi simbol identitas budayanya. *Kedua*, yang menjadi faktor penghambat proses pembauran yaitu dibukanya terusan Suez pada tahun 1865. Jalur baru ini meningkatkan imigrasi besar-besaran wanita-wanita Tionghoa, kehadiran wanita-wanita Tionghoa dalam jumlah besar itu berpengaruh sangat besar dalam proses perkawinan. Lelaki Tionghoa yang sebelumnya tidak mempunyai pilihan lain selain mengawini wanita pribumi, kemudian cenderung mengambil wanita satu suku sebagai isteri. Pembauran yang sebelumnya ada menjadi terhenti, karena proses perkawinan campur terhenti. *Ketiga*, mulai berkuasanya Belanda atas tanah Indonesia dan menempatkan minoritas Tionghoa dalam satu wilayah yang disebut *China Town* atau *Pecinan* (Margianto, 2007, www.kompas.com).

Selain dua faktor yang sangat mempengaruhi mandegnya proses pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia menurut Lombard di atas, ternyata faktor politik kolonial Belanda merupakan faktor yang dominan dalam memperkeruh permasalahan pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia dengan menciptakan stereotipe negatif³ antara minoritas Tionghoa dan pribumi. Menjadikan orang Tionghoa sebagai broker Belanda dalam perdagangan untuk menguasai hasil kekayaan pribumi, membuat orang Tionghoa mendapat cap sebagai kelompok kaki tangan penjajah. Untuk memperlancar peranan Tionghoa dalam perdagangan kolonial Belanda, diberlakukanlah sistem pembagian masyarakat atas dasar garis ras yang dibagi menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab dan India) dan golongan Pribumi (Bumiputra) yang tertuang dalam pasa 163 *Indische Staatsrageling* (IS). Sebagai salah satu akibat politiknya adalah

³ Konsep mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subyektif dan tidak tepat (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1999, hlm.963).

menempatkan golongan Tionghoa lebih diuntungkan daripada golongan Pribumi, di mana golongan Tionghoa mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu yang memungkinkan mereka menduduki lapisan lebih tinggi di atas pribumi terutama dalam perdagangan (Soekanto 2002, hlm.85).

Mendapat perlakuan khusus dari kolonial Belanda, membuat minoritas Tionghoa memasuki fase baru permasalahan mereka pada ranah politik. Dengan mendirikan *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK), *Siang Hwee* dan *Soe Po Sia* tahun 1900-an di Batavia yang menjadi tonggak awal gerakan nasionalisme kaum peranakan Tionghoa di Indonesia. Perkembangan THHK yang membangkitkan rasa nasionalisme orang Tionghoa kepada negeri asalnya di Indonesia menjadi faktor bagi pribumi untuk juga menumbuhkan rasa nasionalis dengan mendirikan organisasi-organisasi nasionalis seperti Sarekat Dagang Islamiyah oleh R.A. Tirtoadisuryo di Buintenzorg (Bogor), Sarekat Islam di Surakarta oleh H. Samanhudi. Untuk menyaingi perkembangan THHK, kemudian kolonial Belanda mendorong berdirinya organisasi partai politik orang Tionghoa yang pro-Belanda yaitu *Chung Hwa Hui* (CHH). Melihat CHH yang pro-Belanda, membuat sebagian orang Tionghoa tidak setuju lalu mendirikan partai nasionalis yang pro-Indonesia yaitu Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada tahun 1932. Dengan demikian pada waktu itu kaum Tionghoa peranakan terbagi dalam tiga golongan politik yang besar, yaitu golongan *THHK*, *Siang Hwee* dan *Soe Po Sia* yang berorientasi ke negeri Tiongkok, golongan CHH yang berorientasi ke Hindia Belanda dan golongan PTI yang berorientasi ke Indonesia. Dengan berdirinya PTI adalah sebuah upaya pertama kali yang dilakukan segelintir keturunan Tionghoa secara politik dalam rangka membaaur dengan pribumi (Suryadinata 1986, hlm.44).

Sikap keberpihakan peranan Tionghoa kepada Belanda tidak hanya memperlebar perbedaan dikalangan Tionghoa sendiri, tetapi juga mengundang sikap permusuhan dari kaum pergerakan nasionalis Indonesia. Persoalan bertambah rumit ketika usaha sebagian orang Tionghoa yang pro-Indonesia harus menghadapi perlakuan tidak ramah dari kelompok nasionalis Indonesia. Walaupun kaum nasionalis Indonesia seperti Sukarno, Moh. Husni Thamrin menyambut baik kerjasama dengan pergerakan PTI yang pro-Indonesia. Hubungan yang tidak harmonis semakin tajam sesudah tahun 1930-an ketika gerakan nasionalisme Indonesia berpaling kepada Jepang sebagai sumber inspirasi, sementara peranan Tionghoa sangat anti-Jepang (Lohanda 2002, hlm.62).

Faktor-faktor di atas kemudian sangat mempengaruhi perjalanan permasalahan pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia, hal ini terlihat pada awal pemerintahan Orde Lama Bung Karno menempatkan orang Tionghoa sebagai salah satu suku-suku yang ada di Indonesia adalah untuk pertama kalinya orang-orang Tionghoa kemudian disebut dengan etnis Tionghoa. Dengan demikian orang-orang Tionghoa adalah etnis Tionghoa yang telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sebagai wujud dari format Negara Indonesia yang *indigeneus nation* (Negara suku), menempatkan posisi etnis Tionghoa sama kedudukannya dengan suku-suku lainnya adalah suatu format yang pas. Namun akibat meletusnya pemberontakan G30S/ PKI ide tersebut kandas untuk diwujudkan. Posisi Tionghoa kemudian menjadi kabur kembali dengan mengganti penyebutan Tionghoa dengan Cina adalah sebagai “hukuman” yang diberikan oleh pemerintahan Orde Baru, karena orang-orang Tionghoa di Indonesia dianggap sebagai agen “pemerintah Cina” yang turut mendukung pemberontakan PKI tahun 1965, ketika itu “pemerintah Cina” masih memberlakukan Politik Dwikewarganegaraan turut memperburuk posisi minoritas Tionghoa di Indonesia. Menurut T. J. Lan sebagaimana

dikutib oleh Susetyo menyebutkan bahwa peristiwa G30S/ PKI 1965 merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan trauma paling berat bagi orang Tionghoa di Indonesia (Susetyo 1999, hlm.2).

Kebijakan pembauran pemerintah Orde Baru terhadap minoritas Tionghoa dengan memaksakan pada pilihan pembauran total (*inkorporasi*) dengan menghilangkan identitas “Cina”-nya dan menjadi orang Indonesia. Namun demikian motivasi pemberlakuan pembauran inkorporasi nampaknya lebih bernuansa “hukuman” karena sangkaan keterlibatan orang Tionghoa dalam pemberontakan PKI tahun 1965 masih tetap melekat pada minoritas Tionghoa hingga jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Pada kenyataannya kebijakan tersebut justru memberikan kontribusi terhadap berbagai kerawanan dan gejolak sosial yang memprihatinkan seperti prasangka, kerusuhan-kekerasan massa dengan sasaran minoritas Tionghoa⁴. Klimaks dari kerusahan tersebut adalah ketika meletusnya kerusuhan Mei 1998 yang kemudian menyisakan trauma kembali bagi golongan minoritas ini, selain akibat berbagai tindakan kekerasan yang dialaminya juga akibat perlakuan diskriminatif yang membelenggu gerak hidup masyarakat Tionghoa ini dan pada kenyataannya pembauran *inkorporasi* (total) itu sendiri telah gagal (Susetyo 1999, hlm.3).

Keberadaan etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas juga sering kurang menguntungkan dalam konteks relasi minoritas – mayoritas. Minoritas selalu menjadi

⁴ Pada tahun 1966 terjadi pembakaran rumah orang-orang Tionghoa, tentu ada kesalahan yang berarti pembauran tidak berjalan baik dan berakibat kecurigaan yang berlebihan yang akan membuat peristiwa tahun 1966 terjadi lagi. Ternyata pada tahun 1994 memang terjadi, unjuk rasa buruh berakibat terjadinya pembakaran dan perusakan terhadap pabrik dan pemukulan terhadap orang Tionghoa. (Baqir Zein 2000, hlm.111-112). Dalam Suara Pembauran juga dituliskan bahwa peristiwa 13-14 Mei 1998 yang telah meluluhlantakkan ribuan ruko, toko, rumah tinggal, pusat pertokoan, bengkel, apartemen, supermarket, kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, bahkan juga pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Tionghoa di Jakarta dan Solo merupakan puncak kehancuran martabat dan jati diri etnis Tionghoa di Indonesia.

sasaran prasangka dan diskriminasi dari kalangan mayoritas. Beberapa kali minoritas Tionghoa menjadi sasaran pengganti (*displacement*) atau “kambing hitam” bagi rakyat yang frustrasi di era pemerintahan Orde Baru yang represif dalam bentuk kerusuhan “anti Cina”. Kedudukan sebagai minoritas bagaimana pun selalu rawan, baik itu dalam posisi sebagai minoritas yang lemah maupun minoritas yang kuat. Maka dalam konteks ini ternyata permasalahan minoritas Tionghoa masih menjadi permasalahan yang besar bagi bangsa ini, walaupun sudah sejak lama minoritas Tionghoa membaaur dengan penduduk pribumi. Sejak awal kemerdekaan Indonesia sebenarnya telah banyak upaya yang dilakukan untuk menuntaskan permasalahan minoritas dan memperjuangkan nasib minoritas Tionghoa melalui organisasi, seperti *Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia* (Baperki), *Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa* (LPKB), *Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa* (Bakom PKB) atau organisasi yang bersifat sosio-politis, yaitu *Centre For Strategic and International Studies* (CSIS) (Suryadinata 1986, hlm.212).

Kehadiran berbagai organisasi baik yang bersifat sosial maupun politik di atas adalah dalam rangka mencari solusi atas permasalahan minoritas Tionghoa di Indonesia menjadi salah satu tujuan utama mengapa organisasi tersebut dibentuk. Baik atas prakarsa pemerintah maupun atas kesadaran minoritas Tionghoa sendiri untuk mencari format yang tepat tentang pembauran minoritas Tionghoa dengan penduduk pribumi serta menghapus *stereotype* yang selama ini tumbuh subur dibenak-benak penduduk pribumi dan minoritas Tionghoa. Namun pada kenyataannya kehadiran organisasi sosial maupun politik yang dibentuk pemerintah Orde Lama maupun Orde Baru belum memperlihatkan hasil yang menggembirakan, dikarenakan kehadiran organisasi tersebut setengahnya dipaksakan dan tidak tumbuh dari kesadaran komunitas minoritas Tionghoa itu sendiri.

Melihat kenyataan yang terjadi pada komunitas minoritas Tionghoa di Indonesia yang selalu menjadi “kambing hitam” atas permasalahan, ketimpangan sosial selalu berada dibibir jurang diskriminasi dalam perjalanan sejarah Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, tidak dapat dibantah lagi bahwa permasalahan pembauran minoritas Tionghoa hingga saat ini masih menjadi isu yang sangat penting dan memerlukan pemikiran dalam pemecahannya. Sehingga kekerasan, kerusuhan, penjarahan serta perlakuan diskriminasi terhadap minoritas Tionghoa tidak terulang kembali.

Keberadaan Haji Abdul Karim Oey Tjeng Hien⁵ sebagai sosok pembauran di Indonesia menjadi sangat diperhitungkan dalam upaya mencari format pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia, penulis merasa tertarik pada sosok pemikiran pembauran yang dari sejak awal secara konsisten berusaha memecahkan permasalahan pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia dengan mengusung konsep pembauran melalui penyebaran agama mayoritas (Dakwah Islamiyah). Karim Oey tidak saja disebut sebagai sosok pemikir pembauran di Indonesia, tetapi disebut juga sebagai pionir pembauran di Indonesia. Karim Oey sebagai tokoh panutan berusaha menggagas pembauran melalui aspek agama, ia berpendapat bahwa dengan berpindahannya seorang Tionghoa ke agama Islam, yaitu agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, maka akan dipandang secara otomatis telah membaur dengan penduduk asli. Pendapat di atas didasari oleh pengalaman yang dialami oleh Karim Oey sendiri, sebagai seorang peranakan Tionghoa yang hidup dari zaman penjajahan kolonial Belanda dan Jepang, zaman perjuangan kemerdekaan hingga zaman kemerdekaan. Melihat fenomena yang

⁵ Demi konsistensi dalam penulisan penelitian ini peneliti selanjutnya menggunakan nama sang tokoh dengan nama *Karim Oey* yang sengaja peneliti ambil dari 2 suku kata yang satu identik dengan nama Indonesia dan yang satu lagi identik dengan nama Tionghoa, merujuk kepada Haji Abdul Karim Oey Tjeng Hien sepanjang pembahasan ini, namun untuk tempat khusus dalam judul besar pada bagian peneliti masih akan menggunakan kata tersebut secara lengkap.

dihadapi oleh orang Tionghoa sangat dilematis, di mana ia ikut merasakan dipandang rendah oleh kalangan Tionghoa. Ketika ia memutuskan untuk memeluk Islam pada tahun 1926, sesuatu hal yang sangat langka di kalangan keturunan Tionghoa waktu itu. Ketika itu masuknya seorang Tionghoa ke dalam agama Islam dipandang suatu hal yang menjadi perbincangan di mana-mana. Dia disebut sebagai seorang saudara baru pada masyarakat pribumi, meskipun dari masyarakat Tionghoa sendiri dipandang bahwa ia telah menjatuhkan martabatnya sendiri karena telah turun menjadi “*inlander*”, gelar yang rendah martabatnya yang selalu ditujukan kepada anak negeri asli (Effendi 1988, hlm.17).

Sikap pembauran telah ditunjukkan Karim Oey sejak muda belia dengan turut aktif pula di sejumlah organisasi seperti *Tanah Air Sendiri* (TAS) yang mempunyai klub sandiwara, sepakbola dan orkes gambus, di mana Karim Oey menjadi ketuanya di antara mayoritas anggota yang pribumi. Kemudian beliau juga aktif di organisasi Muhammadiyah, sebagai wakil DPR dari Partai Masyumi, aktif pula di Bakom PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa) dan berbagai organisasi lainnya. Selain sebagai da'i di kalangan etnis Tionghoa, beliau juga dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Karim Oey juga sangat intens menerapkan pembauran khususnya di lingkungan keluarganya, di mana kedua anaknya menikah dengan penduduk pribumi asli. Untuk turut pula menyukseskan pembauran etnis Tionghoa, Karim Oey mendirikan organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia disingkat PITI⁶, yang bertujuan menyampaikan Islam kepada minoritas Tionghoa di Indonesia, sehingga mereka menjadi

⁶ Organisasi PITI berasal dari gabungan 2 organisasi yaitu “Persatuan Tionghoa Islam” disingkat PTI pada tahun 1953 dan “Persatuan Tionghoa Muslim” disingkat PTM pada tahun 1963 bersama Kho Goan Tjin sepakat menggabungkan 2 organisasi PTI dengan PTM (Persatuan Tionghoa Muslim) membentuk organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (disingkat PITI), dan sejak tanggal 15 Desember 1972 *Persatuan Islam Tionghoa Indonesia* berubah menjadi *Pembina Iman Tauhid Islam* dan singkatannya masih tetap PITI, selanjutnya penulis akan menyebut nama organisasi tersebut dengan singkatan PITI merujuk pada organisasi tersebut.

nasionalis sejati dan muslim yang taat. Kemudian, di tahun 1991 sejumlah tokoh Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Al-Washliyah, Korp Alumni dan Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI & HMI) dan muslim Tionghoa sepakat mendirikan Yayasan Haji Abdul Karim Oey untuk mengenang perjuangan dan jasa-jasanya (Karim 1982, hlm.9).

Melihat sosok Karim Oey tidak hanya sebagai tokoh pembauran semata, namun yang lebih unik lagi beliau adalah tokoh pergerakan kemerdekaan yang sejak lama melaksanakan pembauran dengan komunitas pribumi, ia tidak hanya diterima dengan lapang dada, namun ia juga telah menduduki tangga pranata sosial⁷ di tengah masyarakat mayoritas yakni menjabat Ketua Muhammadiyah Cabang Bengkulu, Ketua Partai Masyumi, Anggota DPR RI dari Partai Masyumi. Dengan menjabat sebagai Ketua organisasi yang cukup terkenal ketika itu, merupakan bukti bila Karim Oey telah berhasil dalam bidang pembauran. Posisi Karim Oey yang sangat berpengaruh di mata tokoh nasional yang turut memberikan sumbangsih besar bagi perjuangan kemerdekaan dan pergerakan Islam di Indonesia. Karim Oey juga turut memikirkan pemecahan permasalahan pembauran etnis Tionghoa di Indonesia khususnya dengan usaha dakwah melalui organisasi PITI, keterpanggilan dalam mendakwahkan ajaran Islam itulah yang melatarbelakangi pemikiran pembaurannya. Selain itu sebagai seorang keturunan Tionghoa, ia juga merasa berkewajiban untuk mengajak minoritas Tionghoa lainnya agar menerima pemikiran dan gagasannya dalam upaya mengatasi permasalahan pembauran etnis Tionghoa di Indonesia. Oleh karena itu penulis menilai bahwa penelitian tentang sosok Karim Oey dan segala gagasan-gagasan pemikiran pembaurannya sangat penting

⁷ Lembaga sosial, Organisasi sosial maupun lembaga masyarakat yaitu suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting (Narwoko kk 2004, hlm.196)

untuk diteliti, apalagi permasalahan pembauran etnis Tionghoa pasca runtuhnya rezim Orde Baru kembali menjadi perdebatan yang panjang, artinya untuk permasalahan pembauran etnis Tionghoa di Indonesia masih perlu dicarikan solusi dan format yang baru. Dalam hal ini penulis menemukan sosok Karim Oey yang menerapkan pembauran di tengah lingkungan keluarga dan juga mengajak etnis Tionghoa Indonesia untuk turut pula bergaul dengan penduduk asli dalam konteks pembauran yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang aktual. Berdasarkan gagasan-gagasan dan pemikiran Karim Oey tersebut di atas serta permasalahan pembauran minoritas Tionghoa dewasa ini yang masih menjadi perdebatan hangat, maka penulisan tentang sosok Karim Oey sebagai sosok tokoh pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia dalam sebuah tulisan Tesis dengan judul "*Pemikiran H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien Tentang Pembauran Minoritas Tionghoa di Indonesia*" layak untuk dibahas dan diteliti.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diungkapkan adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana pemikiran pembauran minoritas Tionghoa H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien?
2. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran pembauran H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien dengan pemikiran tokoh-tokoh pembauran di Indonesia?

Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pembahasan permasalahan di atas sehingga pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tetap dalam bingkai rumusan masalah,

maka sangat penting jika penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut ;

- 1). Penulis akan mengungkapkan secara jelas pemikiran H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien tentang pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia.
- 2). Kemudian penulis akan membandingkan pemikiran pembauran minoritas Tionghoa H. Abdul Karim Oey Tjen Hien dengan pikiran tokoh-tokoh pembauran lainnya, selain penulis ingin menemukan persamaan dan perbedaan antara pemikiran H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien dengan tokoh-tokoh lainnya, penulis juga akan menganalisa posisi pemikirannya di tengah pemikiran pembauran lainnya.

Dengan demikian penulis dapat mengetahui secara jelas pokok-pokok pemikiran pembauran Karim Oey sebagai upaya serta sumbangsuhnya untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan minoritas Tionghoa di Indonesia.

Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengungkap pemikiran pembauran H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien.
2. Kemudian untuk mengetahui pula apa persamaan dan perbedaan pemikiran H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien dengan pemikiran tokoh-tokoh pembauran minoritas di Indonesia.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk ;

1. Merekonstruksi pemikiran H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien sebagai sosok pembauran di Indonesia, serta mendokumentasikan pemikiran pembaurannya secara utuh, lengkap dan sistematis (*komprehensif*) untuk selanjutnya dijadikan bahan

perbandingan bagi pemecahan permasalahan pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia.

2. Mengetahui upaya-upaya yang pernah dilakukan H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien, di mana ia diakui sebagai salah satu pionir pembauran etnis Tionghoa di Indonesia, sehingga dapat menjadi teladan yang patut dihayati bagi generasi sekarang dan akan datang, khususnya oleh kalangan minoritas Tionghoa.
3. Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan untuk mencari format pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia, yang hingga kini masih menjadi bahan permasalahan yang berkepanjangan.

Definisi Operasional

Pada definisi operasional ini penulis mencoba menguraikan kata-kata dalam judul tesis ini yaitu "Pemikiran H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien Tentang Pembauran Minoritas Tionghoa di Indonesia" dengan demikian secara garis besar akan diketahui apa yang akan dibahas dalam tesis ini.

Adapun kata-kata tersebut yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut ; *Pemikiran* diambil dari kata pikir dengan imbuhan "pe-an" yang berarti : akal, budi, ingatan, angan-angan, kata dalam hati, pendapat (pertimbangan). Pemikiran berarti proses, perbuatan memikir, cara memikir, problem yang memerlukan pemikiran dan pemecahan. Jadi pemikiran adalah proses untuk mencapai ide atau gagasan yang dapat terwujud menjadi perbuatan dan cara memikir problem yang memerlukan pemecahan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hlm.873).

Sedangkan *H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien* adalah nama seorang keturunan Tionghoa yang hidup dan dibesarkan di Indonesia, setelah memeluk Islam kemudian

namanya mendapat tambahan nama islami yaitu Abdul Karim, sedangkan nama aslinya adalah Tjeng Hien dan Oey sendiri adalah nama marga yang dibawanya.

Pembauran berasal dari kata baur kemudian mendapat imbuhan “pem-an” yang artinya proses atau cara perbuatan membaurkan percampuran dengan upaya peniadaan sifat-sifat eksklusif kelompok etnik di dalam masyarakat dalam usaha mencapai kesatuan bangsa. Cara atau perbuatan dalam upaya mencapai proses pembauran dapat ditempuh melalui perkawinan campuran warga negara asli (pribumi) dengan warga keturunan asing (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hlm.115). Sedangkan istilah pembauran menurut para Sosiolog adalah berbaurnya 2 (dua) kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu pembauran oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, pembauran meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Hasil dari proses pembauran adalah semakin tipisnya batas perbedaan antar individu dalam suatu kelompok atau bisa juga batas-batas antar kelompok. Selanjutnya individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok, demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain (www.wikipedia.org, 2007).

Sinonim dari istilah pembauran adalah *asimilasi*⁸, yaitu proses terjadinya perkawinan campuran yang berbeda budaya, prilaku dan golongan (Departemen

⁸ Merujuk pada pengertian kedua kata di atas, antara *pembauran* dan *asimilasi* menurut hemat penulis tidak adanya perbedaan makna yang signifikan antara keduanya hanya saja pengertian pada istilah *pembauran* adanya upaya penghapusan sifat-sifat eksklusif dari kelompok etnis. Oleh karenanya dalam tulisan ini penulis lebih cenderung menggunakan istilah *pembauran* dari pada istilah *asimilasi*, kecuali pada tempat-tempat tertentu penulis akan tetap menggunakan istilah *asimilasi* berdasarkan kutipan. Sedangkan istilah lain yang hampir sama dengan kedua istilah di atas adalah *akulturasi*, yang merupakan *sub-proses* dari *asimilasi* sebab dalam akulturasi hanya memandang proses pembauran dari aspek budayanya saja

Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hlm.70). Berdasarkan beberapa literatur yang penulis baca bahwa kedua istilah ini tidak mengandung pertentangan makna, keduanya sama-sama terjadinya proses percampuran baik melalui perkawinan yang berbeda budaya, perilaku atau golongan sehingga perbedaan kedua budaya akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Pembauran atau Asimilasi pada tingkat yang paling rendah adalah dengan terjadinya perkawinan antara dua budaya yang berbeda, yang mana perbedaan budaya tidak dihiraukan lagi atau tidak menjadi suatu permasalahan. Proses perkawinan campur tidak akan pernah terjadi bila kedua budaya dipengaruhi oleh sikap stereotipe negative yang dapat melahirkan sikap eksklusif pada minoritas Tionghoa dan sikap diskriminatif pribumi terhadap minoritas Tionghoa. Sikap eksklusif dan diskriminatif kemudian melahirkan sikap stereotipe negatif yang tercipta sejak penjajahan Belanda.

Istilah *Minoritas* adalah golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain di suatu masyarakat dan terkadang didiskriminasi oleh golongan mayoritas (Departemen Pendidikan Nasional 2002, hlm.745). Golongan minoritas yang jumlah kecil dan selalu mengalami diskriminasi yang dimaksud dalam tesis ini adalah golongan Tionghoa, kemudian perlu dijelaskan juga bahwa dalam tesis ini kata Tionghoa juga sering diikuti oleh kata etnis, oleh karenanya agar tidak terjadi pemahaman yang menyimpang maka perlu pula dijelaskan apa yang dimaksud dengan etnis Tionghoa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dinyatakan bahwa etnis adalah sesuatu yang bertalian dengan kelompok sosial di sistem sosial atau

sehingga istilah *akulturasi* lebih tepat bila digunakan oleh para pakar di bidang ilmu Antropologi. Sebagaimana diungkapkan oleh Koentjaraningrat, *akulturasi* adalah proses sosial yang terjadi bila manusia pada suatu masyarakat dengan kebudayaan yang sedemikian rupa berbeda sifatnya, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tadi perlahan-lahan diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri (Koentjaraningrat 1990, hlm.91).

kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya (Departemen Pendidikan Nasional 2002, hlm.309).

Dari pengertian kedua istilah minoritas dan etnis yang mengikuti kata Tionghoa, menurut penulis kedua istilah dalam penggunaan tidak mengandung pemahaman yang saling bertentangan akan tetapi kedua istilah tersebut bila mengiringi kata Tionghoa sama-sama menyatakan dan mengandung arti atau pengertian suatu kelompok sosial yang memiliki sistem sosial atau kebudayaan atau kedudukan dalam suatu kelompok masyarakat mayoritas, karena kelompoknya yang minoritas itu mereka diskriminasi oleh golongan mayoritas.

Istilah *Tionghoa* sebagaimana dijelaskan di atas bahwa istilah ini terambil dari kata "*Zhong Hua*" artinya secara harfiah adalah bahasa tengah dan bila menyebut orang Tionghoa dengan sebutan "*Zhong Guo Ren*" atau "*Zhong Guo*" artinya negeri di tengah (Dunia). Dalam prakteknya istilah Tionghoa untuk pertama kali digunakan di Indonesia pada tahun 1900 yang diambil dari istilah perkumpulan yang dibentuk oleh etnis Tionghoa yaitu "*Tiong Hoa Hwee Koan*" (THHK). THHK ini bergerak di bidang pendidikan dan kehidupan keagamaan khususnya Konfusianisme. Pada tahun 1928 Gubernur Jenderal Hindia Belanda secara formal mengakui penggunaan istilah "Tionghoa" dan "Tiongkok" untuk berbagai keperluan resmi. Penggunaan istilah ini hanya bertahan 38 tahun saja, karena di tahun 1966 Orde Baru kembali menggunakan istilah "Cina". Ada beberapa alasan mengapa peneliti lebih cenderung menggunakan istilah Tionghoa daripada istilah lain seperti Tiongkok atau Cina, yaitu bahwa istilah Cina walaupun secara etimologi berasal dari *Qin*, nama dinasti yang pada tahun 221 SM untuk pertama kalinya dalam sejarah Cina berhasil mempersatukan bangsa tersebut, setelah tercerai-berai menjadi negara kecil yang saling berperang selama lebih dari dua abad.

Istilah Cina bila dilihat secara etimologi di atas adalah istilah yang netral maknanya, namun sangat disayangkan istilah ini terlanjur berkonotasi buruk lantaran sering dikaitkan dengan hal-hal buruk golongan etnis Tionghoa, oleh karenanya banyak orang-orang keturunan Cina lebih senang dipanggil Tionghoa ketimbang dipanggil Cina⁹.

Dari uraian definisi operasional di atas, apa yang diinginkan penulis pada judul tesis “Pemikiran H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien Tentang Pembauran Minoritas Tionghoa di Indonesia” adalah membahas gagasan, ide dan proses pemikiran Karim Oey dalam upaya untuk mencari pemecahan problematika terhadap usaha-usaha percampuran antara kelompok kecil keturunan Tionghoa dengan penduduk pribumi, sehingga upaya tersebut dapat menghilangkan sifat-sifat eksklusif dan diskriminasi kelompok etnik di dalam masyarakat untuk mencapai kesatuan bangsa.

Uraian pembahasan judul tesis di atas menurut pendapat penulis sangat relevan dengan Program Studi Sejarah Pemikiran Islam dan Konsentrasi Islam di Indonesia yang diambil oleh penulis, karena penulis membahas pemikiran tokoh Karim Oey yang notabene adalah salah satu tokoh pergerakan Islam di Indonesia, dan setiap gagasan-

⁹ Dalam hal ini peneliti lebih cenderung menggunakan istilah Tionghoa daripada istilah Cina karena beberapa alasan berikut, yaitu *pertama* berdasarkan hasil Seminar yang dilaksanakan pada bulan September tahun 1998 di Universitas Indonesia dikatakan bahwa istilah Cina telah terlanjur berkonotasi buruk yang digunakan untuk mengacu pada sekelompok orang yang berperilaku buruk, sedangkan yang berperilaku baik itu “bukan Cina”. *Kedua* istilah Cina secara *psikologis emosional* telah mengandung pengertian menghina dan melecehkan. *Ketiga*, istilah Cina yang merupakan istilah kompromi dari istilah China yang ejaannya tidak ada dalam kosakata bahasa Indonesia selain itu istilah ini tidak diakui oleh RRT. *Keempat*, ditinjau dari sejarahnya istilah Cina cenderung dihapus-paksakan oleh pemerintahan Orde Baru yang mengikuti politik Amerika yang anti-komunis dan anti-Cina, yang pada tahun 1967 mengeluarkan Instruksi Presiden No.14 tahun 1967 perihal pelarangan agama, kepercayaan dan adat istiadat etnis Tionghoa yang artinya memberangus ekspresi kehidupan sehari-hari etnis Tionghoa. Dari latar belakang sejarah tersebut istilah Cina kembali mengalami pengertian yang sangat negatif, perspektif negatif tersebut sama halnya dengan pandangan orang Indonesia yang tidak senang dipanggil “*Inlander*” pada masa penjajah Belanda dan menganggap panggilan tersebut sebagai penghinaan sekalipun artinya adalah “*pribumi*” atau “*anak negeri*” yang tidak ada konotasi menghina. *Kelima*, berdasarkan hasil jajak pendapat Majalah Tempo No.48/ XXIX penyebutan kata Cina untuk minoritas Tionghoa di Indonesia banyak tidak disetujui dengan hasil presentase 54% tidak setuju penyebutan kata Cina dan 46% masih setuju dan tidak memperlakukan penggunaan istilah Cina (lihat www.indonesiamedia.com).

gagasan pemikirannya selalu dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga pembahasan tesis ini dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Sepengetahuan penulis belum banyak orang yang mengkaji secara khusus pokok-pokok pemikiran pembauran yang digagas oleh Karim Oey tokoh pembauran minoritas Tionghoa ini secara detail. Keberadaan buku otobiografi Karim Oey yang ditulisnya sendiri dengan judul "*Mengabdikan Agama, Nusa dan Bangsa (Sahabat Karib Soekarno)*" diterbitkan oleh PT. Gunung Agung Jakarta tahun 1982 ini sangat membantu penulis untuk meneliti lebih mendalam tentang pemikiran-pemikiran pembaurannya, di mana buku ini ditulis atas desakan para sahabat Karim Oey agar kiranya menuliskan otobiografinya sendiri secara objektif. Isi buku ini menceritakan tentang sejarah hidup dan pengalaman Karim Oey sebagai sahabat Bung Karno, jalan hidupnya sebagai pengusaha, sikap tegasnya menentang penindasan dan ketabahannya dalam menyiarkan Agama Islam di kalangan minoritas Tionghoa serta segudang kegiatan organisasi di Muhammadiyah, Masyumi dan lain-lain termasuk upaya-upaya pembauran minoritas Tionghoa yang pernah dilakukannya.

Deni Kusuma seorang mahasiswa Universitas Sriwijaya dalam skripsinya berjudul "*Sejarah Perjuangan Organisasi Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) di Palembang dalam Bidang Agama, Sosial-Budaya dan Ekonomi (1970-2005)*" hanya sekelumit membahas Karim Oey sebagai pendiri organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Begitu juga dalam skripsi yang ditulis Wilna Yusita mahasiswi Fakultas Adab IAIN Raden Fatah Palembang berjudul "*Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) di Palembang : 1980-2002*", dan Eka Winarti mahasiswi IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta dengan judul “*Sejarah Pergerakan PITI (Pembina Iman Tauhid Islam) dalam Pembauran Pribumi dan Non Pribumi di Palembang (1970-2003)*”, keduanya tidak banyak membahas secara khusus ketokohan Karim Oey sebagai pendiri organisasi tersebut hanya saja keduanya membahas peranan organisasi PITI dalam upaya pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia.

Leo Suryadinata (1986) pakar dalam penelitian permasalahan minoritas Tionghoa di Asia Tenggara di dalam bukunya “*Dilema Minoritas Tionghoa*”, membahas tentang permasalahan etnis Tionghoa dari zaman kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka, di mana permasalahan minoritas Tionghoa menurutnya akan senantiasa berada dalam dilema yang berkepanjangan bila sikap stereotipe masih ada dalam pikiran masing-masing kelompok dari minoritas maupun mayoritas. Selain itu kebijakan politik pemerintah yang berkuasa juga turut mewarnai dilema tersebut yang membuat permasalahan minoritas Tionghoa tersebut tetap aktual. Di mana posisi minoritas Tionghoa berada dipersimpangan jalan, sehingga melahirkan dilema tersendiri yang perlu dicarikan solusi terhadap posisi minoritas tersebut dengan melihat fakta sejarah akan keberadaannya di tengah perjalanan bangsa Indonesia yang memiliki masyarakat multikultural. Buku-buku yang ditulis dan sebagian hasil penelitian dari Suryadinata tentunya akan menjadi rujukan bagi penulis dalam memenuhi data-data sangat membantu penulis dalam melihat permasalahan minoritas Tionghoa khususnya di Indonesia.

Yang lebih menarik lagi kumpulan tulisan beberapa tokoh nasional seperti Bung Karno, Bung Hatta, Abdurrahman Wahid, Koentjaraningrat, Nurcholish Madjid, Sultan Takdir Alisyahbana dan beberapa tokoh lainnya yang diedit oleh Yunus Yahya (1991) dalam sebuah buku berjudul “*Nonpri di Mata Pribumi*” yang berisikan beberapa pemikiran tokoh-tokoh di atas dalam mencari solusi masalah pembauran minoritas

Tionghoa dengan pribumi, serta cara pandang pribumi tentang minoritas Tionghoa sehingga menimbulkan rasa saling pengertian, mencari format baru pembauran yang pas dalam mengatasi persoalan pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia.

Penelitian dan tulisan-tulisan di atas menunjukkan bahwa studi tentang pemikiran pembauran Karim Oey dalam upaya pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia secara khusus belum pernah dilakukan. Penelitian dan tulisan-tulisan di atas hanya sebatas mendeskripsikan permasalahan pembauran minoritas Tionghoa, kemudian hanya mengungkap aneka pemikiran pembauran dalam upaya mencari format baru dalam mengatasi persoalan pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia dan belum secara terfokus pada konsentrasi pembahasan mengenai pemikiran pembauran Karim Oey. Diharapkan *Library Research* ini dapat memberi sumbangan pemikiran dalam mencari solusi atas permasalahan di atas, khususnya dalam memperoleh kejelasan tentang pemikiran H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien tentang pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia yang merupakan salah satu tokoh pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia yang patut pula diteliti lebih lanjut. Posisi Karim Oey sebagai sosok pioner pembauran di Indonesia dapat dijadikan contoh bagi generasi muda umumnya dan kalangan minoritas khususnya, sehingga pemikiran pembauran Karim Oey dapat menjadi rujukan dalam pemecahan permasalahan pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia.

Kerangka Teori

Untuk memperjelas arah penelitian ini, peneliti akan konsisten pada studi tokoh (*otobiografi*) di mana fokus penelitian ini adalah terletak pada “pemikiran Karim Oey tentang pembauran”, jika dikaji secara teoritis maka dalam penelitian ini secara spesifik peneliti mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan pemikiran dan pembauran.

Teori yang berhubungan dengan pemikiran secara umum dinyatakan bahwa pemikiran merupakan refleksi sekaligus embrio dari gerak sosio-kultural yang berguna untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul, lebih jelasnya pemikiran adalah produk eksperimentasi, pengalaman dan kolaborasi-dialektika yang dinamis dengan realitas. Adapun yang dimaksud dengan pemikiran adalah lebih mengarah kepada proses atau perbuatan berdasarkan pertimbangan. Dapat didefinisikan bahwa pemikiran adalah proses menggunakan akal untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. Melihat berbagai kemungkinan gagasan atau ide dan ciptaan serta membuat pertimbangan wajar, membuat keputusan, menyelesaikan masalah yang seterusnya melakukan sesuatu dan berpikir terhadap proses yang dialami (Amin 1998, hlm.359).

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan pembauran sebagai berikut ;
Pertama, teori Asimilasi atau pembauran, proses bertemunya dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru, yang ditandai dengan adanya upaya-upaya mengurangi perbedaan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia meliputi upaya mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Bila individu melakukan pembauran dalam suatu kelompok masyarakat berarti individu-individu kelompok itu meleburkan kebudayaannya, kemudian melahirkan suatu kebudayaan baru. Biasanya terjadi pertukaran unsur-unsur budaya, namun hal itu terjadi apabila suatu kelompok menyerap budaya kelompok lainnya. Proses sosial adalah aspek dinamis dari kehidupan masyarakat di dalamnya terdapat suatu proses hubungan antara manusia satu dengan lainnya. Proses hubungan tersebut berupa interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus (Feagin 1993, hlm.27, lihat pula <http://id.wikipedia.org/wiki/Asimilasi>).

Menurut Gordon, teori asimilasi atau pembauran dapat diklasifikasikan ke dalam 6 pola atau tingkatan, yaitu :

Pertama, *Asimilasi Kebudayaan*, yakni perilaku berhubungan dengan pola kebudayaan dalam upaya menyesuaikan diri dengan mayoritas. Kedua, *Asimilasi Struktural*, yakni bertalian dengan masuknya minoritas secara besar-besaran ke dalam perkumpulan dan pranata pada tingkat kelompok primer dari mayoritas. Ketiga, *Asimilasi Perkawinan* atau *Amalgamasi*, yakni bertalian dengan perkawinan antar kelompok dalam kuantitas besar-besaran. Amalgamasi merupakan proses sosial yang melebur dua kelompok budaya menjadi satu, yang pada akhirnya melahirkan sesuatu yang baru. Keempat, *Asimilasi Identifikasi*, yakni bertalian dengan kemajuan rasa kebangsaan secara eksklusif berdasarkan kelompok mayoritas. Kelima, *Asimilasi Perilaku*, yakni bertalian tidak adanya prasangka dan diskriminasi. Keenam, *Asimilasi Kewarganegaraan (civic)*, yakni bertalian dengan tidak adanya konflik dengan sistem nilai dan pertalian kekuasaan (Gordon 1964, hlm.71. Lihat pula Narwoko dan Suyanto, hlm.44)

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1980, hlm.255-256), mengungkapkan bahwa pembauran akan berproses bila ada : 1). Golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. 2). Saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama. 3). Kebudayaan-kebudayaan dari masing-masing golongan berubah sifatnya yang khas dan membentuk unsur-unsur kebudayaan campuran. Dalam keadaan umum golongan-golongan yang terlibat dalam proses pembauran adalah golongan mayoritas dan golongan minoritas. Dalam perkembangannya tidak cukup dengan intensitas dan frekuensi pergaulan kemudian disebut pembauran. Sebab di antara golongan-golongan yang berhadapan tersebut haruslah tumbuh sikap toleransi dan simpati. Orang Tionghoa yang ada di Indonesia telah bergaul secara luas dan menunjukkan intensif dengan orang pribumi sejak berabad-abad lamanya, namun mereka belum juga terintegrasi ke dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia.

Adapun faktor yang dapat diketahui sebagai pendorong terjadinya pembauran adalah sebagai berikut ;

1). Toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan. 2). Kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. 3) Kesiapan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya. 4). Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 5). Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal. 6). Perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya. 7). Mempunyai musuh yang sama dan meyakini kekuatan masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut (Narwoko dan Suyanto 2004, hlm.42-43).

Sedangkan faktor penghambat pembauran antara lain sebagai berikut ;

1). Kelompok yang terisolasi atau terasing (biasanya kelompok minoritas). 2). Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi. 3). Prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru. 4). Kekhawatiran ini dapat diatasi dengan meningkatkan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan. 5). Perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. 6). Kebanggaan berlebihan ini mengakibatkan kelompok yang satu tidak mau mengakui keberadaan kebudayaan kelompok lainnya. 7). Perbedaan ciri-ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit atau rambut. 8). Perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang bersangkutan. 9). Golongan minoritas mengalami gangguan dari kelompok penguasa (Narwoko dan Suyanto, 2004, hlm.44).

Kedua, teori integrasi, adalah suatu proses percampuran minoritas Tionghoa ke dalam bangsa Indonesia, tanpa meninggalkan budaya asalnya. Dalam pengertian yang lebih spesifik, integrasi ini lebih tepat sebagai “Penggabungan” minoritas Tionghoa ke dalam bangsa Indonesia, sebagai “suku baru” lengkap dengan budayanya. Teori integrasi untuk pertama kali dikumandangkan oleh pemerintahan Bung Karno. Integrasi atau penggabungan pada waktu itu dianggap sebagai proses yang terbaik yang diklaim telah diterima oleh semua orang Tionghoa di Indonesia, meskipun sebenarnya tidak semua orang Tionghoa setuju dengan paham integrasi tersebut. Paham ini lebih kurang ingin meniru model yang telah terjadi di Kalimantan Barat. Namun sebaliknya situasi dan kondisi di masing-masing daerah, tidak semuanya dapat menerima proses seperti yang terjadi di Kalimantan Barat tersebut (Antono, 2007).

Ketiga, teori inkorporasi (pembauran total), teori yang menginginkan minoritas Tionghoa membaur dengan suku-suku di Indonesia tanpa membawa atau menghilangkan

identitas “Cina”-nya dan dipaksakan untuk menjadi orang Indonesia kebalikan dari teori integrasi. Teori ini diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru sebagai akibat dan ”hukuman” atas sangkaan keterlibatan orang Tionghoa dalam pemberontakan G30S/ PKI (Susetyo 1999, hlm.3).

Keempat, teori identitas sosial (dalam Taylor dan Moghaddam, 1994) adalah identitas individu yang tampil dalam setiap interaksi sosial disebut dengan identitas sosial, yaitu bagian dari konsep diri individu yang terbentuk karena kesadaran individu sebagai anggota suatu kelompok sosial, yang di dalamnya mencakup nilai-nilai dan emosi-emosi penting yang melekat dalam diri individu sebagai anggotanya. Horowitz mengungkapkan bahwa asimilasi merupakan suatu proses perubahan identitas etnis. Perubahan identitas etnis terjadi apabila dua atau lebih kelompok etnis saling berinteraksi berupa penyempitan dan pelebaran batasan etnis. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam proses perubahan identitas kelompok etnis dipengaruhi oleh dua faktor ; Pertama, kontak dengan orang baru dari suatu etnis memiliki beragam kesukaan dan perbedaan. Kedua, ukuran dan kepentingan unit politik di dalamnya, di mana kelompok yang berbeda tersebut terjadi interaksi dan munculnya kesadaran dari kelompok masing-masing dalam proses sosial (Horowitz 1981, hlm.115).

Dari uraian teori pemikiran dan pembauran di atas, jelaslah bahwa untuk menjawab permasalahan pada tesis ini diperlukan pemahaman tentang pemikiran pembauran tersebut? Pemikiran pembauran adalah proses terciptanya gagasan-gagasan dalam mencari solusi untuk memecahkan problematika pembauran, dalam penelitian ini yang menjadi objek permasalahan adalah permasalahan pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia, yang akan penulis gali dari pemikiran pembauran Karim Oey dengan menggunakan analisis teori-teori di atas.

Metodologi Penelitian

Agar penelitian ini tidak keluar pada prosedur dan kaidah-kaidah studi tokoh, maka perlu diuraikan kerangka teoritik studi tokoh. Maka perlu dijelaskan hal-hal teknis dalam metodologi penelitian yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan teori studi tokoh. Adapun studi tokoh ini bila diletakkan dalam pola pemikiran filosofis maka dapat dijelaskan dalam tiga domain yaitu ; *ontologi*, *epistemologi* dan *aksiologi*. Di mana dalam tataran domain ontologi pada studi tokoh bersifat ;

- 1). Alamiah artinya studi tokoh harus dilakukan apa adanya tanpa ada rekayasa atau manipulasi.
- 2). Induktif maksudnya teori, fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang dibangun peneliti didasarkan pada data yang diperoleh dari sang tokoh atau lainnya.
- 3). *Process oriented* maksudnya peneliti harus cermat, teliti dan terus menerus mengikuti kaidah-kaidah studi tokoh.
- 4). Komitmen bersama maksudnya data yang diperoleh sebelumnya harus dilaporkan secara lengkap serta dirundingkan bersama dengan sang tokoh dalam hal ini bila sang tokoh dinyatakan masih hidup.
- 5). *Emik-etik* maksudnya dalam melakukan analisis atau penafsiran peneliti harus menempatkan sang tokoh dalam perspektif sosial-budaya sang tokoh.
- 6). *Verstehen* maksudnya peneliti diharapkan mampu mengeluarkan kembali dalam pikirannya sendiri perasaan, motif dan pikiran-pikiran yang ada di balik tindakan sang tokoh (Furchan 1992, hlm.36).

Dalam tataran domain epistemologi menempatkan studi tokoh dalam perspektif pendekatan ;

- 1). Historis maksudnya studi tokoh pada dasarnya mengungkap sejarah seseorang oleh karenanya studi tokoh harus menggunakan kaidah-kaidah kesejarahan yang tidak lepas dari ruang dan waktu beserta fakta-fakta sejarahnya.
- 2). Sosio-kultural-religius maksudnya melakukan penelitian ini

peneliti tidak bisa melepaskannya dari konteks sosio-kultural-religius sang tokoh sebab pada dasarnya segala perasaan, pikiran dan tindakan sang tokoh merupakan refleksi dari sosio-kultural-religius sang tokoh. 3). Prosedural artinya studi tokoh harus dilakukan secara prosedural. 4). *Partisipatoris* maksudnya keterlibatan peneliti dalam melakukan studi harus partisipatif jika sang tokoh masih hidup, namun bila telah meninggal partisipasi peneliti dapat melalui karya-karya sang tokoh. 5). *Deskriptif – kualitatif* maksudnya studi tokoh pada dasarnya merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. 6). *Reflektif* maksudnya dalam melakukan studi ini peneliti harus mampu memberikan respon secara tepat. 7). *In-depth* maksudnya studi tokoh akan lebih bermakna bila memfokuskan pada masalah-masalah yang spesifik mengenai kehebatan sang tokoh. 8). *Kritik - analisis* artinya studi tokoh harus mampu mengungkapkan kelebihan dan kekurangan sang tokoh secara kritis tanpa harus kehilangan rasa obyektif (Furchan 2005, hlm.25-28)

Sedangkan dalam tataran domain aksiologi, penelitian tokoh adalah ;

- 1). Keteladanan maksudnya orang dapat mengambil hikmah dari tindakan-tindakan sang tokoh yang bernilai positif, sehingga tindakan-tindakannya dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. 2). Introspeksi artinya dari hasil penelitian ini sang tokoh dapat mengintrospeksi diri dalam hal ini bila sang tokoh masih hidup. 3). Studi tokoh dapat memberikan sumbangan keilmuan (Furchan 2005, hlm.29).

Secara garis besar kerangka teoritis penelitian tokoh ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 1

Pola Pemikiran Filosofis Studi Tokoh

Ontologi	Epistimologi	Aksiologi
<ul style="list-style-type: none"> • Alamiah • Induktif • Process • Oriented • Komitmen bersama • Emik-Etik • Verstehen 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Historis • Pendekatan Sosio-Kultural-Religius • Prosedural • Partisipatoris • Deskriptif-Kualitatif • Reflektif • In-Depth • Kritis – analisis • Proposal tentatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Keteladanan • Introspeksi • Memberi sumbangan keilmuan

--	--	--

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan memakai dua pendekatan yaitu : *Pendekatan Historis* dan *Pendekatan Sosio-Kultural-Religius* serta kaidah-kaidah studi tokoh lainnya, sehingga tidak hanya sebatas pada tataran epistemologi semata, bahkan bila memungkinkan sampai pada tataran domain aksiologi. Pendekatan Historis digunakan dalam studi tokoh pada dasarnya mengungkapkan sejarah seseorang. Oleh karena itu studi tokoh harus menggunakan kaidah-kaidah kesejarahan yang tidak lepas dari ruang dan waktu beserta fakta-fakta sejarahnya. Sedangkan pendekatan Sosio-Kultural-Religius digunakan untuk melihat segala perasaan, pikiran dan tindakan sang tokoh sebagai akibat dari refleksi Sosio-Kultural-Religius yang mempengaruhi tokoh tersebut (Furchan 2005, hlm.25-26).

2. *Sumber Data*

Ada dua jenis data yang dibutuhkan untuk menyempurnakan penelitian ini, yaitu data-data *primer* dan *sekunder*. Data primer yang dipakai peneliti adalah buku otobiografi Karim Oey yang ditulisnya sendiri dalam sebuah buku berjudul “Mengabdikan Agama, Nusa dan Bangsa (sahabat karib Bung Karno)”. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku, hasil penelitian, Tesis atau Desertasi yang berkaitan dengan pembahasan pembauran minoritas Tionghoa dengan Pribumi sebagaimana beberapa data yang peneliti sebutkan dalam tinjauan pustaka, serta beberapa buku teori Sosiologi untuk mendukung penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan atau mencari data baru secara langsung di lapangan.

3. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut ;

1. Melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa buku yang berkaitan dengan topik permasalahan. Selanjutnya buku-buku tersebut diklasifikasikan berdasarkan isinya untuk memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan.
2. Melakukan wawancara langsung dengan keluarga atau orang yang berinteraksi langsung dengan sang tokoh, dengan teknik wawancara penulis berharap mendapatkan data-data tentang tokoh Karim Oey dan aplikasi gagasan-gagasan pembaurannya baik yang diterapkan dilingkungan keluarga atau di organisasi yang didirikannya (Furchan 2005, hlm.51-55). Adapun beberapa tokoh yang akan dijadikan informan bagi peneliti adalah H. Yunus Yahya (Lauwchuantho)¹⁰ selain sebagai ketua Yayasan Haji Abdul Karim Oey Jakarta, beliau juga dahulunya adalah teman Karim Oey sekaligus tokoh asimilasi. H. M. Syarif Tanudjaja selaku pengurus Yayasan H. Abdul Karim Oey. Selanjutnya peneliti juga akan mewancarai H. Ali Karim selaku anak Karim Oey.

4. Teknik Penulisan

Teknis penulisan tesis ini berpedoman pada buku “*Pedoman Penulisan Tesis*” yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang (M. Sirozi dkk 2005, *Edisi Revisi*) Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, selanjutnya data tersebut dianalisa. Analisis tersebut merupakan tahap yang penting dan menentukan, karena dalam tahap ini data dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil dalam menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan dalam penelitian. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam penelitian ini data yang sudah dikumpulkan diolah untuk

¹⁰ Karena kondisi Yunus Yahya yang sudah sepuh, beliau tidak bersedia untuk diwawancarai oleh penulis.s

diklasifikasikan sesuai dengan jenis datanya. Apakah data-data tersebut termasuk sumber primer atau sumber sekunder.

Pengelolaan data dalam analisis dimaksudkan untuk menganalisa data secara mendalam tentang sejarah dan perjuang yang dijadikan objek bertujuan untuk merekonstruksi secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, verifikasi, serta menganalisa bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 menguraikan beberapa Pemikiran Tentang Pembauran Minoritas Tionghoa di Indonesia yang meliputi pembahasan sebagai berikut : DP. Budi Susetyo ; Krisis Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia (Mencari Akar Permasalahan Pembauran). Bung Karno ; Pembauran Lewat Persamaan Nasib dan Cinta Tanah Air. Umar Kayam ; Frustrasi dan Stereotipe : Sikap Penghambat Proses Pembauran. Emil Salim ; Membina Keselarasan Hubungan antara Minoritas Tionghoa dan Pribumi. Fahmi Idris ; Minoritas Tionghoa Jangan Bersikap Eksklusif. Sultan Takdir Ali Syahbana : Bagaimana “Men-Tionghoa-kan” Orang Indonesia dan Yunus Yahya ; Pribumi Kuat, Kunci Pembauran.

Pada Bab 3 ini penulis membahas tentang Sejarah Hidup Haji Abdul Karim Oey Tjeng Hien dalam beberapa Sub-bab yaitu Masa Kecil dan Pendidikan Karim Oey, Karim

Oey Memeluk Islam, Aktivitas Sosial-Keagamaan Karim Oey, Aktivitas dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan Pandangan Tokoh Nasional tentang Karim Oey.

Bab 4 membahas Pemikiran Pembauran Haji Abdul Karim Oey Tjeng Hien yang meliputi pembahasan ; Identifikasi Diri Berdasarkan Universalisme Islam, Pemikiran Nasionalis Berdasarkan Persamaan Nasib dan Cinta Tanah Air, Berpikir Terbuka Terhadap Pribumi, Menjadikan Dakwah Islamiyah Sebagai Sarana Pembauran dan Perbandingan Pemikiran Pembauran Minoritas Tionghoa antara Karim Oey dengan Pemikiran Tokoh-Tokoh Pembauran.

Bab 5 merupakan bab penutup dan kesimpulan serta hal-hal apa saja yang akan direkomendasikan oleh penulis.

Bab 2

BEBERAPA PEMIKIRAN TENTANG PEMBAURAN MINORITAS TIONGHOA DI INDONESIA

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki masyarakat majemuk, multikultural yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda suku bangsa, budaya dan bahasa. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran dan sikap persatuan seluruh masyarakat Indonesia yang multikultural tersebut untuk meraih kemerdekaan bagi bangsanya. Adalah minoritas Tionghoa yang sejak awal kemerdekaan Indonesia yang keberadaannya selalu menjadi perbincangan apakah termasuk bagian dari masyarakat Indonesia yang multikultural tersebut. Dalam fakta sejarahnya minoritas ini telah lama menetap di Indonesia dan sebagian kecil dari mereka secara individual telah ikut berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mengangkat senjata mengusir penjajah dan pada masa kemerdekaan turut pula mengisi kemerdekaan Indonesia dengan mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia melalui olahraga bulu tangkis, seperti Rudy Hartono, Susi Susanti, Lim Siau Long dan lain-lain. Walaupun secara politis khususnya setelah kemerdekaan Indonesia kedudukan mereka secara yuridis telah diakui sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang multikultural tersebut. Proses percampuran dan pengakuan yang secara yuridis diakui menjadi tidak netral lagi, terlebih lagi kelompok minoritas Tionghoa dibedakan menjadi integrasi dan asimilasi sebagai reaksi keras dari praktik politik kewarganegara ganda Republik Rakyat Cina. Selain itu berbagai kebijakan politik yang diberlakukan bagi minoritas Tionghoa di Indonesia dari sejak awal kemerdekaan sampai sekarang membuat status minoritas Tionghoa di Indonesia menjadi kabur dan terjerumus pada kontroversial serta sering menjadi bahan perdebatan yang tidak pernah selesai.¹

Secara hukum dan politis orang Tionghoa yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sama dengan orang Indonesia lainnya, tetapi kenyataan sehari-hari sering dianggap sebagai orang asing di negeri sendiri. Jika dilihat dari sudut sosiologis proses percampuran antara keturunan imigran yang datang dari Tiongkok dengan suku-suku setempat dapat dibedakan menjadi “peleburan, pembauran dan

¹ Salah satunya kontroversial dan masih dalam perdebatan ini adalah mengenai identitas kewarganegaraan Tionghoa. Sebagai orang yang merantau, tentu mereka memiliki nenek moyang sendiri dari negeri mereka berasal. Kemudian mengenai penggunaan istilah “Cina” atau “Tionghoa”. Pemertintah dan mayoritas masyarakat pribumi cenderung masih mempopulerkan istilah “Cina”, namun masyarakat Tionghoa tidak mau lagi disebut dengan istilah “Cina”, dengan alasan merendahkan atau mengandung kata hinaan.

penggabungan”¹. Adanya perbedaan proses pencampuran menyebabkan timbulnya perbedaan pandangan politik orang Tionghoa Indonesia dari dahulu sampai sekarang. Apa yang dilakukan oleh Karim Oey disebut sebagai pembauran. Berdasarkan kondisi dan proses inilah, maka dalam kajian berikut ini perlu dijelaskan mengenai beberapa pemikiran tokoh tentang upaya pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia, sebagai berikut :

DP. Budi Susetyo : Krisis Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia (Mencari Akar Permasalahan Pembaruan)

Fakta sejarah menggambarkan bahwa minoritas Tionghoa memiliki problematika sendiri yang sangat mendasar yakni masalah identitas. Identitas sebagai etnis maupun individu yang berupaya menyatu dengan masyarakat Indonesia. Fakta ini pada hakekatnya merupakan akar permasalahan pembauran antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia. Budi Susetyo berbicara masalah mendasar etnis Tionghoa melalui pemikiran mendasarnya yakni mengkaji akar identitas Tionghoa. Dalam penelitiannya Budi menegaskan masalah identitas adalah akar penyelesaian pembauran di Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Budi sebagai berikut :

“Persoalan yang mengedepan terutama adalah tentang kepastian status kewarganegaraan. Dikemukakan oleh Coppel (1994) orang Cina pada masa itu terjepit antara berbagai kepentingan baik yang berskala nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia pada waktu itu tidak bisa segera

¹ *Peleburan* adalah Masyarakat Tionghoa Indonesia yang mendukung paham Peleburan, telah melebur ke dalam suku-suku di mana mereka tinggal. Mereka kawin campur dengan anaggota suku setempat dan memeluk agama Islam sebagai agama mayoritas. Tidak ada data yang akurat mengenai jumlah mereka, karena sebagian sudah tidak mau lagi disebut orang Tionghoa. Kondisi ini sebenarnya kurang menguntungkan (advantage - bukan profit) bagi masyarakat Tionghoa Indonesia, karena masyarakat awam tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya cukup banyak orang Tionghoa yang sudah melebur ke dalam suku-suku asli. *Pembauran* adalah Tionghoa Peranakan, yang merupakan keturunan dari hasil kawin campur "kakek moyangnya" yang datang dari Tiongkok dengan wanita setempat, beberapa puluh tahun atau ratusan tahun yang lampau. Jika dilihat dari garis keturunannya, mereka umumnya lebih dari 5 generasi sudah dilahirkan di Indonesia. Kehidupan mereka tidak ada bedanya dengan gaya hidup suku-suku setempat kecuali dari raut mukanya yang masih menunjukkan ciri-ciri ke-Tionghoa-an. Umumnya mereka tidak bisa lagi berbahasa Mandarin atau dialek bahasa lainnya. Sehari-hari mereka berbicara dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah setempat. Mereka tidak terlalu memikirkan budaya yang berasal dari Tiongkok, karena menurut pandangan mereka budaya Tionghoa adalah budaya suku-suku setempat ditambah sisa-sisa kebudayaan kakek moyangnya dahulu. *Penggabungan* adalah masyarakat Tionghoa yang secara relatif masih kental dengan budaya yang berasal dari Tiongkok. Mereka umumnya generasi kedua dan ketiga dari para imigran yang berasal dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia sekitar akhir abad ke 19 sampai menjelang jatuhnya rezim Kuo Min Tang di Tiongkok tahun 1949. Dari pengamatan sepintas, kelompok ini banyak yang kehidupannya cukup makmur dan banyak yang menjadi bos besar. Meskipun demikian jangan diartikan bahwa semua orang Tionghoa dari kelompok ini hidupnya kaya raya. Cukup banyak dari mereka yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Berkat dukungan dana yang kuat, pendukung paham Penggabungan sangat kuat gaungnya dalam era reformasi ini. Mereka ingin mempertahankan budaya asalnya sebagai heterogenitas dari budaya bangsa Indonesia. Mereka juga menghendaki agar diakui sebagai salah satu suku di Indonesia yang sejajar dengan suku-suku lain. Proses ini sering disebut sebagai “*Salad Bowl*”, campuran dari beberapa sayur dalam satu mangkok yang masih kelihatan sayur aslinya (www.indonesiamedia.com).

memberikan kepastian. Bahkan undang-undang yang mengatur hal ini ditengarai akan membatasi jumlah orang Cina yang bisa menjadi warganegara. Sementara pemerintah RRC pada waktu itu masih memberlakukan kewarganegaraan ganda bagi orang Cina di perantauan, yaitu disamping menjadi warganegara di negara tempat merantau juga melekat kewarganegaraan Cina. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut maka sejumlah tokoh Cina mendirikan Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang inti perjuangannya ingin menempatkan etnis Cina sejajar dengan etnis/suku lain dengan konsep integrasi. Sementara kelompok Cina yang lain menghendaki asimilasi sebagai solusi. Namun demikian sejak terjadinya peristiwa pemberontakan PKI 1965, keadaannya berbalik sama sekali. Konsep integrasi secara politis telah dikategorikan sebagai bagian dari ideologi komunis sosialis. Dengan demikian pilihan satu satunya yang diberi ruang oleh penguasa adalah dengan asimilasi” (Susetyo 1999, hlm.5).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa masalah status kewarganegaraan merupakan persoalan inti yang masih dalam proses penyelesaian. Dibalik masalah status, rupanya problem kebijakan yang paling dominan mempengaruhi proses pembauran di Indonesia. Sedikitnya, ada 3 (tiga) hal penting perlunya memahami pembauran dengan identitas melalui kebijakan, yaitu ; *Pertama, Kebijakan RRC*, yang dahulu menerapkan kewarganegaraan ganda untuk Tionghoa perantauan. *Kedua, Kebijakan Bangsa Indonesia*, ketidakjelasan pemerintah dalam menentukan identitas kewarganegaraan, *Ketiga, Lembaga Baperki*, secara politis lembaga ini berkaitan erat dengan munculnya Gerakan PKI, yang sebagian menempatkan sebagai bagian dari ideologi Komunis Sosialis. Selain itu karena adanya berbagai tekanan yang berdasarkan kepentingan dan menempatkan posisi minoritas Tionghoa berada dalam ketidakpastian, sehingga orang Tionghoa yang berada di Indonesia berada di persimpangan jalan. Hal tersebut setidaknya tergambarkan dari temuan penelitian dari Lan dalam “*Pengalaman Etnik Cina dalam Pembentukan Identitas (Nasional) Indonesia*” yang disampaikan pada “*Simposium Etnik Cina sebagai Minoritas di Indonesia tanggal 26 Oktober 1998*”, ia menyatakan bahwa sekarang ini berkembang berbagai orientasi identifikasi diri di kalangan orang Tionghoa di Indonesia. Setidaknya ada 4 orientasi yang ditemukan :

Kelompok pertama, adalah mereka yang percaya bahwa mereka adalah etnis Tionghoa dan akan selalu menjadi etnis Tionghoa. Oleh karena itu dalam mengidentifikasikan diri, mereka selalu kembali ke asal-usul dan warisan budaya etnisnya tersebut.

Kelompok kedua, adalah mereka yang merasa telah berhasil berasimilasi ke dalam masyarakat Indonesia. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa asal-usul etnis dan budaya mereka merupakan kutukan yang menyulitkan posisi mereka untuk menjadi bagian yang utuh dari masyarakat di mana mereka tinggal.

Kelompok ketiga, adalah mereka yang berkeyakinan bahwa mereka telah melampaui batas etnis, negara dan bangsa serta telah menjadi seorang yang globalis dan internasionalis.

Kelompok keempat, adalah mereka yang cenderung beranggapan bahwa hidup mereka ditentukan oleh pekerjaan mereka, sehingga mereka lebih suka menghindari pengidentifikasian diri secara budaya maupun politis (Lan 1998, hlm.4).

Demikian pula dari temuan Tan dalam *Majalah Tempo* Edisi 14-22 Februari 1999 yang meneliti tentang aspirasi dan partisipasi politik orang Tionghoa, ternyata terpilah-pilah menjadi lima kelompok cara pandang, yaitu :

Kelompok pertama adalah yang merasa perlu menonjolkan identitas etnis mereka dan memperjuangkan hak mereka sebagai golongan atau suku di Indonesia dengan berusaha mendirikan partai, misalnya dengan mendirikan Partai Tionghoa.

Kelompok kedua, adalah mereka yang tidak mau menjadikan etnis atau agama sebagai basis gerakan, melainkan melalui platform persamaan hak, misalnya dengan mendirikan Partai Bhineka Tunggal Ika.

Kelompok ketiga, adalah kelompok yang lebih menyukai sebuah forum yang tujuan utamanya lebih sebagai *pressure group*.

Kelompok keempat, adalah mereka yang membentuk paguyuban kelompok karena perasaan senasib sepenanggungan. Misalnya dengan mendirikan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI).

Kelompok kelima, adalah mereka yang bergabung dalam partai politik yang terbuka seperti PDI Perjuangan, PAN dan lain sebagainya (Tan 1999, hlm.5).

Dari paparan di atas kiranya dapat diperoleh gambaran tentang bagaimana dinamika pencarian identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Pada kenyataannya di tengah masyarakat etnis Tionghoa telah berkembang subkultur-subkultur baru yang merupakan respon terhadap realitas sosial yang berkembang dan semakin menggambarkan identitas etnis Tionghoa yang plural. Kemudian Susetyo mencoba menganalisis permasalahan identitas individu minoritas Tionghoa dalam interaksi sosial yang menurutnya adalah merupakan hal yang fundamental dalam setiap interaksi sosial. Menurut T.J. Lan (2000) sebagaimana dikutip Susetyo, mengatakan bahwa setiap individu memerlukan identitas untuk memberinya *sense of belonging* dan eksistensi sosial (Susetyo 1999, hlm.5).

Menurut teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Taylor dan Moghaddam (1994) menyatakan bahwa identitas individu yang tampil dalam setiap interaksi sosial disebut dengan identitas sosial, yaitu bagian dari konsep diri individu yang terbentuk karena kesadaran individu sebagai anggota suatu kelompok sosial, di mana di dalamnya mencakup nilai-nilai dan emosi-emosi penting yang melekat dalam diri individu sebagai anggotanya. Sedangkan menurut Hogg dan Abram (1988) mengatakan bahwa di dalam masyarakat sendiri secara hirarkis terstruktur kategori-kategori sosial yang merupakan penggolongan orang menurut negara, ras, kelas sosial, pekerjaan, jenis kelamin, etnis, agama dan lain sebagainya. Di dalam masing-masing kategori sosial tersebut melekat suatu kekuatan, status dan martabat yang pada akhirnya memunculkan suatu struktur sosial yang khas dalam masyarakat, yaitu suatu struktur yang menentukan kekuatan dan status hubungan antar individu dan antar kelompok. Pada dasarnya setiap individu ingin memiliki identitas sosial yang positif. Hal tersebut lanjut Hogg dan Abram (1988) adalah dalam rangka mendapatkan pengakuan (*recognition*) dari pihak lain serta persamaan sosial (*social equality*). Bahkan menurut Laker (dalam Taylor dan Moghaddam, 1994)

dikatakan dalam keadaan di mana individu ataupun kelompok merasa identitasnya sebagai anggota suatu kelompok kurang berharga, maka akan muncul fenomena *misidentification*, yaitu upaya mengidentifikasi pada identitas/ kelompok lain yang dipandang lebih baik. Fenomena ini misalnya ditemukan pada anak-anak kulit hitam di Amerika yang justru menganggap rendah kelompoknya sendiri dan lebih senang mengidentifikasi pada kelompok kulit putih (Susetyo 1999, hlm.5).

Dalam pandangan teori identitas sosial, keinginan untuk memiliki identitas sosial yang positif dipandang sebagai motor psikologik sangat penting bila dilihat dari tindakan-tindakan individu dalam setiap interaksi sosial. Hal tersebut berlangsung melalui proses *social comparison* yang dipandang sebagai cara untuk menentukan posisi dan status identitas sosialnya (Taylor dan Moghaddam, 1994). Proses *social comparison* merupakan serangkaian perbandingan dengan orang atau kelompok lain yang secara subyektif membantu individu membuat penilaian khusus tentang identitas sosialnya dibanding identitas sosial yang lain. Selalu ada upaya-upaya untuk mempertahankan identitas sosial yang positif dan memperbaiki citra jika ternyata identitas sosialnya sedang terpuruk baik dalam skala individual maupun skala kelompok. Dalam konteks makro sosial (kelompok, masyarakat) maka upaya mencapai identitas sosial positif dicapai melalui : 1). Mobilitas sosial dan 2). Perubahan sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu dari kelompok yang lebih rendah ke kelompok yang lebih tinggi. Mobilitas sosial hanya mungkin terjadi jika peluang untuk berpindah itu cukup terbuka. Namun demikian jika peluang untuk mobilitas sosial tidak ada, maka kelompok bawah akan berusaha meningkatkan status sosialnya sebagai kelompok. Pilihan pertama adalah dengan menggeser statusnya ke tingkat lebih atas. Kalau kemungkinan menggeser ke posisi lebih atas tidak ada, maka usaha yang dilakukan adalah dengan meningkatkan citra mengenai kelompok agar kesannya tidak terlalu jelek. (Lihat dalam Hogg dan Abram, 1988; Sarwono 1999, hlm.32).

Dinamika pencarian identitas etnis Tionghoa sebenarnya terkait perlakuan yang diterima dari pihak penguasa. Hal ini dapat dilihat jaman pemerintahan kolonial Belanda, perbedaan status etnis diberlakukan dengan tegas. Orang Eropa diberi status tertinggi dan mempunyai hak dan fasilitas terbaik. Orang Tionghoa pada waktu itu disebut orang Timur Asing (*vreemde osterlingen*) mempunyai status di bawah orang Eropa dan golongan pribumi (*inlander*) diberi status yang paling rendah (kecuali bangsawan yang diberi status seperti Eropa). Dalam statusnya yang di tengah ini, orang Tionghoa meningkatkan citranya dengan melakukan mobilitas sosial, yaitu mengadopsi berbagai identitas yang melekat pada orang Eropa atau Belanda. Banyak orang Tionghoa yang berpendidikan ala Eropa, cara mereka berpakaian juga ala Eropa, mereka juga mengadopsi agama Kristen dan Katolik seperti orang Eropa disamping keyakinan yang mereka bawa dari tanah leluhurnya dan lain sebagainya. Sangat jarang orang Tionghoa yang mengidentifikasi dengan identitas pribumi, karena status pribumi yang lebih rendah (Susetyo 1999, hlm.6).

Interaksi etnis Tionghoa dengan orang pribumi terjadi nampaknya lebih untuk kepentingan dagang dan kepentingan lain yang bisa menguntungkan. Dalam hal tertentu orang pribumi malah terangkat derajatnya, misalnya ketika ada perempuan pribumi yang dinikahi orang Tionghoa. Dengan demikian yang menonjol pada orang Tionghoa di era kolonial Belanda adalah perpaduan antara identitas Tionghoa tradisional dan identitas ala

Eropa. Namun demikian situasinya nampak berbeda sama sekali ketika memasuki era kemerdekaan. Pasca peristiwa 1965 status etnis Tionghoa sedang dalam kondisi terendah. Mereka dipojokkan oleh penguasa maupun masyarakat bukan Tionghoa. Pada saat itu berbagai kekerasan masa anti Tionghoa mulai marak. Mengacu pada teori identitas sosial, maka ketika suatu kelompok citranya sedang terpuruk selalu ada upaya untuk bereaksi terhadap keadaan ini dalam rangka meraih kembali citra / identitas sosial yang positif.

Apa yang bisa disimpulkan dari paparan di atas, bahwa krisis identitas yang terjadi di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia sangat terkait dengan nuansa kebijakan politik penguasa, di mana mereka memiliki kepentingan tertentu untuk menempatkan etnis Tionghoa sesuai dengan kemauan politiknya. Posisi minoritas yang cenderung rentan, selalu memojokkan etnis Tionghoa dari waktu ke waktu. Krisis identitas etnis Tionghoa terutama memuncak pasca pemberontakan G30/S PKI yang menempatkan status etnis Tionghoa dalam tataran yang paling buruk. Dalam upaya menemukan kembali citra identitas sosial yang positif, etnis Tionghoa menggunakan modus yang variatif baik dalam bentuk mobilitas sosial maupun dengan perubahan sosial. Hal inilah yang menurut Budi Susetyo disebut sebagai akar permasalahan krisis identitas etnis Tionghoa di Indonesia.

Bung Karno : Pembauran Lewat Persamaan Nasib dan Cinta Tanah Air

Dalam pemikiran Bung Karno masalah pri-nonpri menjadi perhatian tersendiri, sehingga beliau perlu memberikan pedoman-pedoman pokok bagi penyelesaian masalah pri-nonpri di tanah air kita. Ada 2 (dua) dokumen penting yang ditandatangani beliau selaku presiden RI/ Pemimpin Besar Revolusi Bangsa Indonesia. Yaitu pada tanggal 22 Februari dan 15 Juli 1963, sebagai berikut :

Amanat Bung Karno 22 Februari 1963

Amanat Bung Karno tanggal 22 Februari 1963 ini adalah amanat tentang asimilasi, asli/ tidak asli dan Bhineka Tunggal Ika, yang berisi :

- 1). "Saya membenarkan usaha pemuda-pemudi untuk memecahkan masalah minoritas dengan jalan asimilasi dan menghilangkan *exclusivisme* dalam tubuh bangsa Indonesia. 2). "Saya tidak mau mengenal perkataan 'asli' dan 'tidak asli' dalam kalangan Rakyat Indonesia. 3). Bhineka = „Das Sein dan Tunggal Ika = Das Sollen“ (Yahya ed, 1991, hlm.35)

Kutipan di atas apa yang diinginkan Bung Karno bahwa dalam tubuh bangsa Indonesia adanya suatu sikap yang eksklusif dapat menghambat proses persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di mana ketika itu proses pembentukan persatuan dan kesatuan merupakan salah satu pilar dari pilar-pilar Negara Kesatuan. Tidak mengenalnya istilah asli tidak asli di kalangan masyarakat Indonesia pada hakikatnya pendiri bangsa ini ingin menyatakan bahwa asal-usul seseorang tidaklah menjadi penting namun yang lebih penting bahwa ia mempunyai jiwa dan semangat persatuan yang harus tertanam dalam jiwa dan raga setiap individu masyarakat bangsa Indonesia yang bung Karno kemas dalam sebuah semboyan *Bhineka Tunggal Ika* (walau berbeda-beda namun tetap satu jua),

boleh berbeda dalam bahasa, ras, agama dan suku bangsa tetapi semangat persatuan untuk membangun bangsa Indonesia harus berada dalam satu bingkai dan satu cita-cita.

Dokumen yang kedua untuk mengatasi permasalahan pri-nonpri sebagaimana tercantum dalam *Amanat Nation-Building 15 Juli 1963* sebagai berikut :

1. Dalam amanat saya, lahirnya Pancasila, saya telah mengemukakan pemikiran-pemikiran yang mendasari proses "*Nation Building*", yaitu adanya keinginan bersama untuk membangun jiwa bangsa yang bersatu, persatuan karakter karena persamaan nasib dan patriotisme.
2. Proses "*Nation Building*" itu terus menerus memerlukan aktivitas yang dinamis, pemupukan mental dan jiwa yang ingin bersatu, persamaan watak atas dasar persamaan nasib, patriotisme, rasa setia-kawan dan rasa loyal terhadap Tanah Air Indonesia. Siapa yang tidak berdiri di atas landasan "*Nation Building*" tadi, sesungguhnya dihindangi oleh penyakit "retak dalam jiwanya dikuasai oleh loyalitas kembar atau loyalitas ganda".
3. Saya membenarkan usaha-usaha jiwa muda dalam pembinaan Kesatuan Bangsa ini, dengan menghilangkan sikap-sikap dan sifat-sifat menyendiri (exklusivisme), dengan jalan penyatuan, pembauran (asimilasi) dalam tubuh Bangsa Indonesia.
4. Saya gandrung akan kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia, saya tidak mau mengenal pembatasan 'asli' dan 'tidak asli', persukuan, serta pemencilan-pemencilan yang berupa apapun dalam kesatuan tubuh Bangsa Indonesia. (Bogor, 15 Juli 1963), (Yahya ed, 1991, hlm.36-37).

Sebagai *follow up* dari kedua amanat di atas, maka Bung Karno mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 140 Tahun 1963 tanggal 18 Juli 1963 untuk membentuk lembaga khusus Pembinaan Kesatuan Bangsa. Lembaga tersebut adalah Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) yang bernaung di bawah Menteri Koordinator Departemen Hubungan dengan Rakyat yakni Dr. H. Ruslan Abdoelgani. Sedangkan LPKB dipimpin oleh seorang kepala yaitu Letnan Hk. ALRI K. Sindhunatha, SH berdasarkan Keppres No. 141 tanggal 18 Juli 1963. Adapun tujuan dibentuknya LPKB adalah untuk membentuk watak perekat bangsa dalam sebuah landasan yang disebut "*Nation Building*" yang didasarkan atas persamaan nasib, sikap patriotisme, rasa kesetiakawanan dan rasa cinta terhadap Tanah Air Indonesia. Sikap, watak dan karakter bila telah menyatu dalam "*Nation Building*" sebagaimana yang diinginkan Bung Karno, maka sikap pemencilan terhadap suatu suku, ras, bahasa dan agama tertentu dalam batas asli atau tidak asli tidak perlu terjadi dalam rangka untuk membentuk kesatuan tubuh bangsa Indonesia.

Umar Kayam : Frustasi dan Stereotype ; Sikap Penghambat Proses Pembauran

Harus diakui bahwa hingga saat ini di Indonesia belum mempunyai strategi pembauran yang pas untuk menyelesaikan permasalahan pembauran golongan minoritas Tionghoa ini. Hal tersebut membuat kedudukan minoritas Tionghoa berada dalam posisi yang

semakin sulit. Seandainya saya kata Umar Kayam, menjadi Tionghoa di negeri ini, tentu saya akan merasa frustrasi sekali. Meski di atas kertas, sebagai warganegara Indonesia masing-masing memiliki hak yang sama, tetapi pada prakteknya orang Tionghoa masih dianggap masyarakat kelas dua. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas dituliskan bahwa yang menjabat sebagai Presiden Indonesia harus orang Indonesia asli artinya tidak mungkin orang Tionghoa nantinya menjadi Presiden. Jadi jelas, setinggi-tingginya kedudukan mereka, tetap berada diposisi kedua setelah pribumi. Di sini letak suatu dilema, di satu pihak Tionghoa sebagai minoritas secara ekonomi memiliki kedudukan yang cukup kuat, sementara secara sosial mereka dianggap sebagai *second classification*. (Yahya ed, 1991, hlm.149)

Pribumi sampai saat ini masih berpandangan kuno terhadap kaum Tionghoa, di mana dalam keadaan-keadaan sosial politik yang rawan orang Tionghoa selalu dijadikan tempat pelampiasan frustrasi. Hal tersebut merupakan cara yang gampang untuk melampiaskan sentimen pada si-Tionghoa oleh gerakan-gerakan rasialis.

Ini merupakan nasib kaum Tionghoa, yang selalu dianggap sebagai warganegara kelas dua, yang sewaktu-waktu bisa dijadikan kambing hitam. Bagaimana untuk mengakhiri semua ini, perbedaan kelas semakin jauh. Bagaimana agar membuat Tionghoa benar-benar membaaur betul secara budaya dan sosial, merasakan suatu *front* dan merasa *confident* untuk menjadi bagian masyarakat. Menyikapi permasalahan di atas Umar Kayam berpendapat bahwa kita harus ada timbal balik, masyarakat kita harus disediakan suatu kondisi di mana ia bisa menyerap struktur sosial budaya. Caranya bermacam-macam, ada yang menyatakan agar penggantian nama sudah membawa beban budayanya sendiri. Tetapi, pada hakekatnya hal itu belum cukup, sekedar penggantian

nama Tionghoa ke nama pribumi, juga perkawinan campur belum merupakan jaminan (Yahya ed, 1991, hlm.150).

Bila suatu kesempatan yang sama diberikan pada orang Tionghoa, terasa adanya reaksi yang luar biasa, praktis orang Tionghoa akan menguasai pribumi kemudian akan memimpin Indonesia. Mereka sudah memiliki kekuatan modal yang dapat menopang kesempatan mereka menjadi pemimpin bila peluang tersebut terbuka, padahal peluang ini relatif tidak akan pernah ada. Selain itu orang Tionghoa selalu menunjukkan kerja baik dan bekerja lebih keras lagi untuk mencapai suatu hasil yang gemilang.

Akan tetapi harus diterima pada kenyataan bahwa kalau ada satu minoritas dalam satu masyarakat, di mana minoritas lebih kaya dari mayoritas, maka akan terjadi ketegangan. Di mana pun kondisinya begitulah adanya, persoalan ini yang harus dicairkan dan jangan sampai golongan Tionghoa larut dalam persoalan ini dan menjadi sumber ketegangan. Kemudian dari pihak pemerintah sendiri hendaknya golongan pedagang pribumi dibantu supaya mereka bisa mengimbangi kedudukan yang sangat kuat dari pedagang Tionghoa. Kalau sudah tercapai satu keseimbangan dalam posisi ekonomis, maka minoritas Tionghoa tidak lagi terlalu menonjol. Jadikanlah minoritas Tionghoa ini sebagai kekuatan ekonomi yang biasa saja. Kaum pribumi juga harus bisa memanfaatkan skill-skill orang Tionghoa ini dalam perdagangan. Jangan hanya menjadi pegawai semua, harus ada kecenderungan yang lain. Banyak orang Tionghoa turunan pedagang mencari profesi ke dunia birokrasi, menjadi priyayi hanya untuk keamanan hal ini bisa dimengerti (Yahya ed, 1991, hlm.151).

Takut terpojoknya kaum Tionghoa pada keadaan tersebut, membuat mereka membentuk kekuatan sendiri. Di lain pihak dan ini tetap menjadi suatu dilema, bila kompetisi dibuka secara adil terasa adanya kekurangan keseimbangan yang mencolok.

Jangan sampai hendaknya kaum minoritas didorong untuk merasa dirinya menjadi golongan elit sosial. Hendaknya jangan menganggap masalah minoritas Tionghoa ini hanya dari sudut keamanan saja, tetapi secara sosial kultural harus dilihat betul. Seorang Tionghoa yang setiap dua tahun sekali harus melapor, dengan kata lain terus diawasi apa bedanya keadaan ini dengan sikap pemerintah Nazi terhadap Yahudi.

Pengertian sub-kultur bukan pengertian yang tertutup, sub-kultur yang luwes selalu diberikan kesempatan untuk mengadakan pembauran. Tetapi, kalau mereka ingin mempunyai identitas, tak ada alasan untuk ditolak, asalkan berani memikul resiko dalam membangun sub-kultur itu tak ada masalah dengan catatan tidak urgen (Yahya ed, 1991, hlm.151).

Keadaan masyarakat kita sayang sekali tidak memberikan suatu kondisi yang sehat untuk berdagang secara terbuka, perkiraan bahwa orang Tionghoa kelihatan lebih ulet dan sebagainya, adalah masalah psikologi perantau. Seorang perantau tentunya memiliki sikap lebih ulet, karena ia merasa berada di tempat yang asing, memaksanya lebih rajin untuk berusaha, sebab kalau tidak ia akan mati. Kebijakan politik Belanda berakibat munculnya persoalan yang lebih parah yang mengindikasikan semakin kuat pertentangan antara Tionghoa dengan Pribumi yaitu semakin banyak menimbulkan prasangka (dugaan)/ *Stereotype* negatif di antara kedua belah pihak. Baik pribumi maupun Tionghoa. Pandangan-pandangan negatif ini sangat “merusak” tatanan yang sebenarnya harmonis sejak lama. Pertentangan ini melahirkan prasangka-prasangka negatif di kedua belah pihak dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Prasangka Negatif Pribumi Terhadap Tionghoa

Dalam berbagai kasus dan literatur ditemukan banyak sekali prasangka-prasangka negatif pribumi terhadap Tionghoa. *Pertama*, “*Mereka Kaya-kaya*”, sebenarnya anggapan ini

sudah berlangsung lama. Masyarakat pribumi menganggap tidak adil, ketika pemerintah Belanda memisahkan mereka dengan minoritas Tionghoa. Akhirnya mereka menguasai perdagangan. Bagir Zein mengungkapkan “Sebenarnya, mengapa mereka berdagang?. Dulu minoritas Tionghoa sulit bekerja menjadi pegawai negeri atau tentara, jalur mereka ke sana memang sulit. Tidak ada tempat lain kecuali mereka masuk perdagangan. Bahwa anggapan stereotip mereka ada dalam perdagangan, maka anggapan masyarakat pribumi mereka kaya-kaya, juga ada benarnya”³. Kekayaan yang diperoleh etnis Tionghoa seolah berlebihan sehingga menimbulkan keirian bagi masyarakat pribumi. Anggapan seperti ini harus diakui masih berlangsung hingga saat ini (Zein 2000, hlm.80-81).

Kedua, “Mereka Tidak Nasionalis”, hal yang sangat memungkinkan masyarakat pribumi menganggap mereka tidak nasionalis adalah karena mereka bukan penduduk asli Indonesia, sehingga mereka tidak cinta tanah air. Di samping itu mereka selalu memusuhi masyarakat pribumi seperti diungkapkan oleh Coppel bahwa “Mereka selalu berpegang teguh pada kebudayaan leluhur mereka. Kesetiaan mereka kepada Indonesia dalam keadaan meragukan dalam keadaan paling buruk bersikap memusuhi masyarakat pribumi” (Coppel 2002, hlm.26).

Ketiga, “Mereka Kurang Etis”, stigma yang juga menganggap orang Tionghoa selalu bertindak kurang etis kepada masyarakat pribumi. Contohnya banyak masyarakat pribumi yang menjadi pekerja atau pembantu dalam berdagang, namun perlakuan mereka terkadang di luar moral kemanusiaan, bahkan gaji-gaji pegawai tidak diberikan secara proporsional. Mereka kurang etis ini dapat ditangkap dari ungkapan Coppel bahwa

³ Walaupun sebenarnya anggapan itu tidak harus berkembang, banyak juga mereka yang notabene adalah etnis Tionghoa yang kumuh dan miskin. Mereka berada di kawasan kumuh di sekitar Glodok dan pengojek banyak dari kalangan keturunan Tionghoa. Kalau banjir mereka bisa tenggelam (*Media Indonesia*, Minggu, 18 Februari 1996).

masyarakat Tionghoa “Masih tidak puas dengan kedudukan istimewa yang mendominasi perekonomian di Indonesia, orang-orang Tionghoa melakukan subversi ekonomi, karena keahlian mereka dalam bidang negosiasi, penyogokan dan penyeludupan” (Coppel 2002, hlm.26).

Keempat, “Mereka Homogen”, minoritas Tionghoa oleh para pemimpin pribumi dianggap sebagai suatu kelompok homogen yang pada umumnya tidak hanya sukar berasimilasi, tetapi juga tidak setia kepada negara-negara Asia Tenggara tempat mereka menetap (Suryadinata 1982, hlm.xx). Anggapan ini tidak jauh dari apa yang ditulis oleh Coppel bahwa “Orang Tionghoa yang selalu diberi keistimewaan pajak dan pemilikan barang oleh pemerintah Belanda mendorong orang-orang Tionghoa tersebut hidup suka berkelompok-kelompok dan menjauhkan diri dari pergaulan sosial serta membangun area pemukiman tersendiri” (Coppel 2002, hlm.26).

Kelima, ”Mereka Kapitalis Asing”, anggapan ini muncul karena menurut Assaat (seorang politisi Sumatera pernah menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia Serikat, RIS, 1950) bahwa “orang Tionghoa adalah kapitalis asing dan selalu secara ekonomi berada di atas”⁴. Walau didera berbagai kesulitan pra-kemerdekaan, namun mereka mampu bertahan. Selama pendudukan Jepang atas Indonesia, orang-orang Tionghoa yang juga turut menderita, namun berhasil mempertahankan kedudukan ekonomi mereka (Suryadinata 1986, hlm.19). Mereka sukses sebagai distributor sekaligus pemilik modal. Assaat menjelaskan sebagaimana dikutip Suryadinata bahwa :

⁴ Ibnu Musthafa menggambarkan sistem kapitalisme diluar kendali atau dengan kata lain dalam sistem ekonomi kapitalis berlaku ”*Free Fight Liberalism*” (sistem persaingan bebas). Semuanya tanpa batas, siapa yang memiliki dan mampu menggunakan kekuatan modal (*Capital*) secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan dalam bisnis. Paham yang mengagungkan kekuatan modal sebagai syarat memenangkan pertarungan ekonomi disebut sebagai kapitalisme. Puncaknya menjadi kapitalisme ekstrim. Ibnu Musthafa menegaskan bahwa kapitalisme ekstrim muncul karena ketatnya persaingan karena meningkatnya modifikasi dan perebutan kosumen (Musthafa 1993, hlm.26).

“Dalam lapangan ekonomi terdapat 3 sektor terbesar, yaitu sektor produksi, sektor distribusi dan sektor konsumsi. Dari tiga sektor ini, maka sektor kedua yaitu distribusi hampir 100% dikuasai oleh golongan Tionghoa....Golongan Tionghoa tidak dapat dan tidak mau dimasuki oleh orang dari golongan lain, baik kulturil dan sosial, apalagi ekonomis....dalam lapangan ekonomi sifatnya demikian eksklusifnya, sehingga praktis sudah monopolitis (Suryadinata 1986, hlm.19).

Monopoli dan eksklusif ini yang dapat dikatakan sebagai “kapitalis”. Kondisi ini jika dibiarkan terus akan sangat besar dan dalam jurang pemisah antara pribumi dan masyarakat Tionghoa, sehingga mereka “mengesampingkan” kemaslahatan umat manusia secara global. Sehingga dapat dikatakannya bahwa paham kapitalisme yang secara tidak langsung ”masuk ke dalam diri mereka” dan kapitalisme tidak mampu memecahkan problem kemanusiaan yang sangat kompleks yang dihadapi umat manusia, krisis moral, krisis lingkungan, krisis sosial dan krisis ekonomi terus meningkat yang menjadi masalah global (Musthafa 1993, hlm.26).

Sedangkan kondisi di atas bisa berlaku sebaliknya, ketika stigma yang dikembangkan oleh masyarakat semakin luas tentang pertentangan, maka objek yang dialamatkan sebagai “manusia eksklusif” membangun stigma yang lain dari yang dikomentari oleh masyarakat pribumi. Maka muncul prasangka-prasangka negatif dari minoritas Tionghoa terhadap masyarakat pribumi sebagai berikut :

Pertama, “Mereka Pemalas”, anggapan ini pun seolah sudah mengakar bagi minoritas Tionghoa ketika memandang masyarakat pribumi. Hampir seluruh minoritas Tionghoa berpandangan masyarakat pribumi malas, karena itu bangsa Indonesia tidak maju dan terus dijajah oleh kaum imperialis dan kapitalis. Sampai dengan sekarang masih membekas di dalam diri mereka.

Kedua, “Mereka Anti-Tionghoa”, gambaran struktur masyarakat Indonesia “Anti-Tionghoa” sengaja diciptakan oleh kolonial Belanda dengan menempatkan

golongan etnis Tionghoa ke dalam konflik etnis yang berkepanjangan. Selain itu kemajemukan bangsa ini belum memasukkan orang Tionghoa dalam struktur kemasyarakatan yang ada. Respon pembatasan peranan yang membatasi ruang gerak masyarakat Tionghoa disimbolkan pada sebutan “orang Cina”, lebih jauh perasaan anti Cina itu menjadi suatu sikap dan perilaku masyarakat lainnya untuk melakukan alienasi kewargaan sehingga mendorong terciptanya kebuntuan proses-proses sosial antar masyarakat. Kebuntuan sosialisasi tersebut mendorong warga Tionghoa untuk bersikap eksklusif dengan membentuk komunitas etnis tersendiri. Ini merupakan suatu langkah awal gerakan sosial sebagai suatu gerakan dari masyarakat kelas tertindas yang teralienasi secara budaya dan politik diluar komunitas pribumi. Komunitas etnis inilah yang mendorong munculnya kecenderungan untuk mempertahankan pengkotaan masyarakat atas pribumi di satu pihak dan bukan pribumi di pihak lain.

Masalah Tionghoa di Indonesia masih berlangsung terus. Kerusuhan anti-Tionghoa masih saja terjadi secara berkala dan ini berpengaruh terhadap kemantapan ekonomi negara tersebut (Suryadinata 1986, hlm.xx). Selama pemerintahan Orde Baru secara terus-menerus terjadi kerusuhan anarkis anti-Tionghoa. Kerusuhan Mei 1998 seakan adalah puncak dari aksi kerusuhan tersebut. Banyak orang sebelumnya berpendapat bahwa kerusuhan anti-Tionghoa tidak mungkin terjadi di Jakarta. Tetapi ternyata menjelang keruntuhan rezim Orde Baru puncak kerusuhan tersebut justru dibiarkan berlangsung oleh aparat keamanan di ibu kota. Dengan kasat mata seluruh dunia dapat menyaksikan bagaimana kerusuhan yang berlangsung selama dua hari penuh, dibiarkan aparat keamanan tanpa melakukan suatu tindakan apapun. Jadi terbukti apa yang selama ini dikhawatirkan etnis Tionghoa memang dijadikan *bumper* dan tumbal keruntuhan rezim Orde Baru.

Ketiga, “Mereka Bodoh”, minoritas Tionghoa menganggap masyarakat pribumi bodoh, karena berada di kelas yang paling bawah. Orang-orang pribumi tidak memiliki ruang untuk berpikir lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup mereka, bahkan justru mereka hanya pasrah akan “ketidaktahuan” mereka tentang jajahan yang menindas dan kejam. Sedikit sekali pada waktu itu yakni pada masa kolonial Belanda, menemukan masyarakat pribumi yang pintar dan cerdas. Anggapan inilah yang menyebabkan minoritas Tionghoa “tidak bergaul” dengan mereka karena “pribumi bodoh”.

Keempat, “Mereka Miskin”, minoritas Tionghoa menganggap masyarakat pribumi ekonominya rendah, mereka miskin. Bahkan yang lebih mendukung pendapat ini adalah orang Tionghoa mempekerjakan kaum pribumi dalam posisi yang tidak berbeda dari status para budak. Bahkan yang sangat berbahaya itu adalah kemiskinan nasional. Ungkapan Coppel cukup penting disimak yaitu : “Orang-orang Tionghoa sangat mendominasi perekonomian Indonesia dan menghalang-halangi kebangkitan nasionalisme golongan pengusaha pribumi...” (Coppel 2002, hlm.26).

Secara umum berbagai persepsi di atas pada hakekatnya harus diperhatikan oleh masyarakat Tionghoa. Pada umumnya para pemimpin kaum pribumi cenderung memandang orang Tionghoa lokal sebagai suatu kelompok yang homogen. Mereka tidak mau menerima status kaum Tionghoa peranakan yang setengah-setengah. Di mata para pemimpin pribumi, orang Tionghoa lokal masih Cina secara budaya, menolak asimilasi, setia kepada kekuasaan luar negeri (sebelum kemerdekaan kepada Belanda atau negara Cina dan setelah kemerdekaan kepada RRC atau Taiwan) dan juga orang-orang yang secara ekonomis sangat berkuasa (Suryadinata 1986, hlm.74).

Penulis sangat mendukung anggapan bahwa “anggapan-anggapan sebagaimana di atas terbentuk secara natural, karena berlangsung lama yang sangat dipengaruhi oleh

kebijakan-kebijakan politik Belanda”. Karena bukti-bukti banyak mencatat bahwa sesungguhnya tidak semua minoritas Tionghoa itu kaya, tidak nasionalis, kurang etis, homogen dan kapitalis asing. Banyak mereka yang miskin, nasionalis, berakhlak atau beretika, berbaur bersama-sama dan membangun ekonomi bersama penduduk pribumi.⁵ Namun pandangan ini dipecah-belah oleh Belanda, karena Belanda memiliki misi yang tidak hanya mengeruk keuntungan dari negeri jajahan, tetapi juga menyebarkan misi agama dan menguasai dunia.

Walaupun demikian karena situasi dalam dan luar negeri yang kompleks, kebijaksanaan pemerintah Indonesia terhadap golongan Tionghoa tidak selalu berjalan dengan asas asimilasi yang selalu didengungkan-dengungkan itu. Nampaknya hal ini disebabkan oleh konflik yang selalu terjadi antara persepsi pribumi dengan minoritas Tionghoa (Suryadinata 1986, hlm.xxi).

Emil Salim : Membina Keselarasan Hubungan antara Minoritas Tionghoa dan Pribumi

Jika diikuti perkembangan sejarah bangsa kita, terutama sejak tahun 50-an sampai sekarang, tampak bahwa proses pembauran antara golongan pribumi dan nonpribumi sudah lama berlangsung. Letupan emosional antara kedua golongan sudah lama berkurang. Pembangunan dalam masa Orde Baru memperoleh dukungan penuh baik dari golongan pribumi maupun nonpribumi.

Generasi baru bermunculan dan tumbuh dalam iklim kemerdekaan dan persatuan bangsa. Banyak golongan pribumi sudah kurang memperhatikan asal suku bangsanya dan banyak pula dari golongan nonpribumi sudah tidak mengetahui lagi asal usul nenek leluhurnya. Banyak orang berpendapat seiring dengan perkembangan waktu, masalah kesukaan di lingkungan pribumi dan masalah non-pribumi lambat laun akan mengabur. Sehingga menjadi masalah, buat apa mengungkit masalah pri-nonpri ini kembali, mengapa pembauran pri-nonpri masih menjadi persoalan?. Menurut hemat Emil Salim sekurung-kurangnya ada tiga sebab membenarkan masalah pri-nonpri :

⁵ Banyak bukti-bukti sejarah yang mendukung keberpihakan minoritas Tionghoa kepada bangsa Indonesia. Bukti-bukti pembauran dalam bidang bercocok tanam dan perkawinan juga dilakukan oleh minoritas Tionghoa. (Lihat Lombard dalam : www.wikipedia.org).

Pertama, perkembangan sejarah kolonial selama 3,5 abad telah dengan sengaja menumbuhkan perbedaan antara golongan pribumi dengan non-pribumi⁶, sehingga dampaknya masih terasa dalam perilaku dan perkembangan kehidupan masyarakat kita. Dampak kebijaksanaan kolonial yang secara sadar menimbulkan diskriminasi, rasial ini perlu ditanggulangi dengan kebijaksanaan nasional yang secara sadar melarutkan garis perbedaan antara pri-nonpri bikinan kolonial.

Kedua, pembangunan menimbulkan perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Struktur ekonomi Indonesia berubah, berbagai kegiatan baru bermunculan. Semua ini mempengaruhi struktur sosial masyarakat pribumi yang sekarang mengenal tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat dengan profesi baru. Perubahan masyarakat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktahuan tentang masa depan, sehingga menghasilkan kantong-kantong potensi guncangan dan keresahan sosial. Hubungan pri-nonpri memuat segi emosional yang mampu menyulut letupan guncangan sosial. Sehingga dibutuhkan pola pengelolaan perkembangan masyarakat yang bisa meniadakan potensi guncangan dan letupan-letupan sosial ini.

Ketiga, penambahan penduduk Indonesia di masa depan memperbesar pergeseran antara kelompok masyarakat dengan berlatar belakang suku bangsa dan penggolongan pri-nonpri. Sehingga perlu diusahakan kebijaksanaan kependudukan mampu merangkul kebhinekaan bangsa kita membina kesatuan dan persatuan bangsa (Yahya ed, 1991, hlm.150-152).

Dari ketiga segi di atas, tidak saja membenarkan pentingnya pembahasan masalah pembauran pri-nonpri, tetapi juga tersimpul dari ketiga persoalan di atas sebagai jawaban serta saran tindak bagi pemecahan masalah ini. Oleh karena itu, perlu kita telusuri lebih mendalam ketiga segi yang mempengaruhi hubungan pribumi dan non-pribumi.

Ahli sejarah kita Ong Hok Ham dalam berbagai tulisannya yang tersebar mengungkapkan pengaruh kebijaksanaan kolonialisme melahirkan golongan nonpri sebagai kekuatan ekonomi dalam masyarakat pribumi. Kebijakan kolonial yang *pertama* adalah dengan sengaja menjadikan golongan nonpribumi sebagai alat

⁶ Dua istilah yang dimunculkan untuk membedakan masyarakat minoritas Tionghoa dan masyarakat mayoritas. Istilah non-pribumi untuk minoritas Tionghoa tersebut mengindikasikan belum diakuinya minoritas Tionghoa sebagai bagian masyarakat pribumi.

penguasaan ekonomi terhadap golongan pribumi. Golongan pribumi tidak dipercaya oleh kolonial, sedangkan golongan nonpribumi, khususnya golongan Tionghoa bisa diawasi, dikendalikan dan dikelola. Golongan nonpri ini dilokalisasi tempat pemukimannya, diberi pemimpin-pemimpinnya sendiri dengan julukan pangkat opsir seperti Kapten dan Mayor, sungguh pun kepangkatan ini tidak ada hubungannya dengan ketentaraan kolonial (Yahya ed, 1991 hlm.154).

Kebijaksanaan kolonial kedua adalah memberi kedudukan lebih tinggi kepada golongan nonpribumi ketimbang golongan pribumi. Undang-undang catatan sipil kolonial menggolongkan penduduk Hindia Belanda dalam kelompok “*Euoropeanen*” (Golongan Eropa), “*Vreemde Oosterling*” (Golongan Timur Asing yang bagian besar terdiri dari golongan Tionghoa) dan “*inlander*” (Golongan Pribumi), sesuai pasal 131 dan 163 *Indische Staatsrageling*. Kedudukan sipil berlainan ini menghasilkan secara sadar perbedaan antara pri dan nonpri. Akhirnya, tumbuh aturan berlainan antara kedua golongan pri-nonpri dalam sistem pewarisan, perkawinan, agama, lokalisasi pemukiman dan sebagainya yang menghasilkan sistem nilai dan perilaku kehidupan berbeda antara pribumi dengan nonpribumi (Yahya ed, 1991 hlm.154).

Masih banyak lagi kebijaksanaan kolonial bisa diungkapkan di sini. Namun, cukup dikutip hanya sebagian untuk membuktikan luas dan dalam pengaruh kebijaksanaan kolonial masa lalu terhadap masalah pri-nonpri sampai sekarang. Perlakuan selama lebih dari 1 abad seperti ini, menumbuhkan sistem nilai yang masuk sampai sekarang kebagian inti (*core value*), sehingga tidak bisa dihapus dalam masa 38 tahun kemerdekaan ini. Maka lahir dan hiduplah di kalangan golongan pribumi suatu citra tentang golongan nonpribumi dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Nonpribumi adalah terutama makhluk ekonomi, mengutamakan perhitungan ekonomi dan hubungan antar manusia ditentukan oleh pertimbangan ekonomi;
2. Nonpribumi selalu berorientasi dan selalu dekat pada pihak berkuasa, siapapun yang berkuasa dan aliran politik apapun dianut penguasa. Sang penguasa bisa beralih dari

kolonial ke penguasa Jepang di masa perang Pasifik, lalu beralih ke Republik dalam berbagai masa dan keadaan. Namun golongan nonpri bisa mengabdikan semua kepada pihak berkuasa dalam masa apapun dan seringkali sikap nonpribumi seperti dinilai sebagai sikap bermuka dua. Dalil “tujuan menghalalkan cara” yang dipakai menimbulkan kesan oportunis melekat pada golongan non-pribumi;

3. Non-pribumi merupakan kelompok tersendiri yang sering menyendiri dalam kelompoknya dengan rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi sekali antar nonpribumi, sehingga mereka merasa terisolasi bagaikan pulau di tengah lautan golongan pribumi; (Yahya ed, 1991, hlm.156).

Citra ini bisa berlebihan, namun yang penting adalah menangkap persepsi golongan pribumi yang umumnya beranggapan demikian, untuk dijadikan pangkal tolak perbaikan hubungan pri-nonpri. Untuk merobohkan dinding pemisah antara golongan pribumi dan nonpribumi, maka perlu diusahakan oleh kedua belah pihak. Kalangan pribumi diharap tumbuhnya sistem nilai inti (*core value*) baru mengganti sistem nilai hasil pertikaian pihak kolonial dahulu. Dari kalangan nonpribumi diharap tumbuhnya keinginan untuk mengimbangi ketimpangan kekuatan ekonomi dengan membangkitkan kekuatan ekonomi golongan pribumi.

Kebhinekaan bangsa dapat menjadi kekuatan bangsa kita. Kita terdiri dari bermacam suku dan keturunan, namun tetap terikat satu bangsa Indonesia. Maka perbedaan yang melekat antara pri dan nonpri tidak perlu ditonjolkan, tetapi persamaannyalah yang terus dikembangkan. Ikhtiar penuh harus ditumpahkan untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi antara golongan pribumi dengan nonpribumi, terutama dengan mendorong kemampuan pribumi mengejar ketertinggalannya.

Usaha ini memakan waktu dan kesabaran. Untuk itu, iklim yang menggairahkan proses perkembangan ini sangat diperlukan. Di sinilah terletak peranan pers dan media masa menciptakan iklim merangsang pertumbuhan keselarasan hubungan antara pribumi dengan nonpribumi, merobohkan dinding pemisah antara golongan ekonomi lemah dengan yang kuat. Segi-segi positif perlu diutamakan dan segi-segi negatif perlu dihilangkan dalam mengembangkan iklim yang menggairahkan proses pembauran ini. Masalah pembauran sudah cukup rumit dan penuh kadar emosi, sehingga mudah menjurus kearah negatif. Pers dan media massa dapat membantu menumbuhkan iklim yang sehat kearah perkembangan positif ini.

Sungguh pun komunikasi pers dan media massa ini penting, namun ini tidaklah cukup. Usaha ini harus disertai langkah tindak perbuatan oleh para pemimpin golongan pribumi dan nonpribumi memberikan contoh dalam tindak laku, sikap hidup, ungkapan dan ucapan yang kondusif bagi berkembangnya pembauran serta lahirnya keselarasan hubungan antara golongan pribumi dan nonpribumi.

Fahmi Idris : Minoritas Tionghoa Jangan Bersikap Eksklusif

Golongan nonpribumi sebaiknya berkongsi dengan pribumi dalam bidang usaha, jangan eksklusif dan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat jangan menyendiri. Menghadapi hal ini pemerintah harus tegas membuka perkembangan yang sehat bagi tumbuhnya potensi pengusaha-pengusaha pribumi. “Kalau pakai istilah yang jelas saja, pribuminya ini dan nonpribuminya itu; dibolak-balik, istilahnya diperhalus, kenyataannya toh begitu kenapa mesti takut”.

Fahmi mengatakan “kalau saya orang Amerika tinggal di bumi Indonesia merasa canggung, tidak bisa menyesuaikan diri dengan adat istiadat Indonesia, ya saya

harus angkat kaki pulang ke Amerika. Masalah nonpribumi jangan dikait-kaitkan dengan psikologis dan rasialis, tidak ada rasialis-rasialisan. Contohnya, Malaysia betapa beraninya mengakui pribumi harus dibantu, yang dimaksud pribumi adalah bangsa Melayu. Nonpribumi tidak boleh begitu, yang dimaksud nonpribumi adalah Cina. Apa pemerintah Malaysia pernah dikutuk oleh organisasi PBB, apa pernah Pemerintahnya dijatuhkan karena mengembangkan masalah ini?. Kan tidak, ini semua tergantung niatnya baik apa tidak”.

Minoritas Tionghoa Indonesia menjadi “Kelompok Eksklusif”⁷ harus sama-sama diakui sebagai fakta sejarah bahwa pasca kebijakan politik Belanda masyarakat yang merupakan kumpulan minoritas Tionghoa menjadi “kelompok eksklusif”, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Sedikitnya ada 3 (tiga) kondisi di mana yang dapat memisahkan mereka dengan masyarakat pribumi : *pertama*, kebencian. Kebijakan Belanda ini telah menanamkan kebencian yang mendalam bagi masyarakat pribumi. Tidak itu saja anggapan-anggapan negatif seperti minoritas Tionghoa yang mendapatkan keistimewaan dari kebijakan politik pemerintahan Belanda. Kebencian masyarakat pribumi semakin menjadi ketika minoritas Tionghoa juga memposisikan diri sebagai golongan atas sederajat dengan Eropa.

Kedua, pembatas, pemerintah kolonial Belanda membatasi secara jelas dengan jarak antara pribumi dan minoritas Tionghoa. Mereka harus terpisah dan dibatasi dalam bergaul dengan pribumi, menempatkan minoritas Tionghoa dalam satu wilayah yang disebut “*China Town*” (Perkampungan Cina) sebagai manifestasi dari “politik pecah belah” Belanda.

⁷ Kelompok eksklusif adalah istilah yang penulis gunakan untuk menunjukkan bahwa akibat kebijakan politik Belanda telah memberikan ruang pertentangan “mendarah-daging” antara masyarakat pribumi dengan minoritas Tionghoa Indonesia dengan berbagai macam prasangka negatif di antara keduanya. Akibat dari kebijakan tersebut adalah terpisahnya minoritas Tionghoa dengan masyarakat pribumi, keterpisahan inilah yang menyebabkan minoritas Tionghoa lebih cenderung bersikap eksklusif, baik dalam bergaul maupun dalam berkomunikasi. Adapun kondisi kelompok eksklusif adalah kebencian, pembatasan, perbedaan, pertentangan dan permusuhan.

Ketiga, perbedaan, dengan terjadinya kebencian dan pembatasan yang berlangsung begitu lama membuat minoritas Tionghoa jauh dari kebudayaan pribumi yang mayoritas. Perbedaan ini membuat jurang yang dalam antara keduanya. Perbedaan budaya dan agama menjadi penyebab munculnya konflik di antara keduanya. Perbedaan ini dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda untuk mengambil keuntungan baik bersifat ekonomi maupun politis (Yahya ed, 1991, hlm.175).

Ketiga kondisi di atas adalah nyata dan fakta, walau politik Belanda masih menyisakan “kenangan pahit”. Betapa tidak masyarakat pribumi diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Belanda. Kecemburuan yang berubah menjadi kebencian tidak hanya terjadi karena perbedaan bahasa, agama, status sosial namun juga perbedaan rasial (pribumi-asing). Minoritas Tionghoa yang mempekerjakan kaum pribumi dalam posisi yang tidak berbeda dari status para budak. Kondisi di atas adalah kesenjangan yang begitu jauh. Dengan pengelompokkan kaum minoritas Tionghoa menyebabkan kehidupan minoritas Tionghoa terkesan eksklusif.

Sultan Takdir Ali Syahbana : Bagaimana ”Men-Tionghoa-kan” orang Indonesia

Pemikiran Sultan Takdir Ali Syahbana⁸ tentang pembauran minoritas yang dinyatakannya dengan cara men-Tionghoa-kan orang Indonesia berawal ketika ia menerima disertasi seorang doktor baru bernama Dr. Sri Mulyani Murtaningsih dengan judul ”*Motif Sosial Remaja SMA Jawa dan Keturunan Cina, Suatu Perbandingan*”.

Disertasi tersebut membahas tentang pembauran antara remaja Jawa dengan remaja keturunan Cina dengan pendekatan motif sosial yang terjadi dalam proses pembauran keduanya, di mana Takdir telah lama menganjurkan kepada para mahasiswanya untuk menulis dan meneliti tentang pembauran minoritas Tionghoa. Menurutnya soal keturunan Tionghoa itu amat penting bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh Asia Tenggara yang bertetangga dengan RRC. Takdir merasa sedih dan bercampur kesal melihat orang Indonesia yang miskin dan terbelakang di negerinya sendiri. Soal terpenting bagi Takdir sebenarnya bukan bagaimana meng-Indonesia-kan orang keturunan Tionghoa seperti yang dilakukan sekarang ini, tapi bagaimana “Men-

⁸ Selanjutnya disebut Takdir, yang menunjukkan nama Sultan Takdir Ali Syahbana.

Tionghoa-kan” orang Indonesia yang dimaksud di sini adalah agar masyarakat pribumi memiliki sifat dan sikap seperti orang Tionghoa (Yahya ed, 1991, hlm.182).

Maksudnya supaya orang Indonesia mendapat konfigurasi nilai atau motivasi seperti orang keturunan Tionghoa, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang intelektual yang mulai merambat. Orang Indonesia nampaknya tercecceh di mana-mana tanpa mampu berbuat sesuatu yang lebih berarti. Semua perubahan itu hanya dapat terjadi bila generasi muda tahu kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Maka Takdir menantang kaum muda Indonesia untuk meraih seluasnya kebudayaan dunia dengan berkenalan dengan aneka kebudayaan yang ada. Karena menurut Takdir, semua kebudayaan akan kembali menjai satu dalam satu dunia.

Yunus Yahya : Pribumi Kuat, Kunci Pembauran

Masalah pembauran minoritas Tionghoa menurut Yahya ada dua kendala pokok mengapa orang Tionghoa susah diterima sebagai “*orang kita*” di Indonesia, yaitu : *Pertama*, ada kendala bidang ekonomi, ada kesenjangan ekonomi, yang satu dianggap lebih atas dari yang dibawah dan ini menimbulkan persoalan. *Kedua*, adanya perbedaan agama. Keduanya harus diatasi bersama sebagai bangsa Indonesia. Apa yang dikemukakan Yahya bahwa permasalahan pembauran di bidang ekonomi adalah merupakan kunci pokok dari permasalahan pembauran, menurutnya kita harus membuat ekonomi si pribumi itu kuat, ini tugas kita semua baik pribumi, pemerintah maupun minoritas Tionghoa. Sebab jika ekonomi pribumi sudah kuat, di satu pihak orang keturunan Tionghoa mau membaur. Jika ekonomi pribumi lemah maka mereka menjadi ragu-ragu dan menurut Yahya itu adalah manusiawi. Selain itu, kalau pribumi ekonominya kuat ia akan merasa “tuan di rumah sendiri”, bila telah merasa “tuan di rumah sendiri” minoritas Tionghoa mau masuk, ya

silahkan, tidak ada jarak psikologis lagi. Jadi kalau kita bisa usahakan pribumi kuat berarti Indonesia kuat, *Nation Building* itu tidak menjadi persoalan lagi (Yahya ed, 1999, hlm.31).

Gagasan tentang penitikberatan pada penguatan bidang ekonomi di kalangan pribumi yang dikemukakan Yahya cukup beralasan, sebab Islam juga mengajarkan umatnya untuk memperhatikan permasalahan bidang ekonomi, di mana Nabi Muhammad sendiri adalah seorang “*entrepreneur*” atau pengusaha yang handal dan tangguh. Oleh karenanya umat Islam harus pandai berdagang, agar tidak dibodohi oleh pedagang yang bukan Islam. Terlebih lagi ada hadits yang menyatakan : “*Bekerjalah kamu di dunia ini seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah kamu di dunia ini seakan-akan kamu mati esok hari*”. Berarti umat Islam diperintahkan untuk berusaha selama hidup ini supaya mencapai hidup makmur, dengan tetap menjalankan ibadah sesuai dengan landasan Islam dengan demikian melalui bisnis dapat membuat ekonomi umat Islam kuat, sebab ekonominya kuat umat Islam akan menjadi khalifah yang terhormat di dunia ini (Yahya ed, 1999, hlm.39).

Bila dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia yang dahulunya adalah pelaut-pelaut yang hebat dan terkenal pula dengan pedagang-pedagang yang hebat itu, dicabut dari akar-akarnya oleh penjajah Belanda dengan diganti kelompok-kelompok minoritas yang sengaja dikembangkan oleh penjajah Belanda menjadi kelompok pedagang, sedangkan umat Islam Indonesia dibuat agar mereka hanya mengaji saja dan tidak memikirkan hal-hal lain apalagi dalam bidang ekonomi. Sehingga jiwa kewirausahaan umat Islam tercabut dari akar-akarnya di jaman penjajah (Yahya ed, 1999, hlm.45-46).

Berdasarkan argumen-argumen yang diutarakan Yahya, tentunya cukup beralasan jika ia menitik beratkan kunci pembauran pada bidang ekonomi di kalangan pribumi, dengan kata lain jika ekonomi pribumi kuat tidak akan terjadi kesenjangan dan kecemburuan ekonomi yang selama ini dirasakan oleh pribumi, sehingga dapat melahirkan tindakan-tindakan diskriminasi terhadap minoritas Tionghoa yang dapat menghambat proses pembauran tersebut.

Bab 5

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis dari sumber-sumber baik primer maupun sekunder terhadap Pemikiran Pembauran Karim Oey melalui berbagai pembahasan terhadap pokok masalah yang telah berhasil dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, adapun pemikiran pembauran Karim Oey tentang minoritas Tionghoa di Indonesia terekam dalam beberapa pemikiran yaitu :

(1). Identitas diri berdasarkan pemahaman Islam yang Universal, maksudnya permasalahan pembauran minoritas Tionghoa akan lebih cepat dapat diselesaikan bila minoritas Tionghoa mengidentifikasi dirinya menjadi muslim Tionghoa, sebuah pengidentifikasian diri yang membawa dampak perubahan identitas budaya yang dibawanya. Selain itu pengidentifikasian diri dengan cara memeluk agama mayoritas dapat menghilangkan stereotipe-stereotipe antara pribumi dan minoritas Tionghoa. Stereotipe yang sengaja diciptakan oleh penjajah Belanda dan yang lebih penting lagi bahwa anggapan minoritas Tionghoa adalah bagian dari agen paham komunis dapat dengan mudah hilang bila minoritas Tionghoa berpegang teguh pada paham ideologi Islam dengan secara tegas menyatakan dirinya sebagai muslim Tionghoa. Sebagaimana yang dipahami oleh penulis dari data-data penelitian, serta ungkapan-ungkapan pemikiran Karim Oey. Yang menurut hemat penulis apa yang dilakukan Karim Oey pada fase ini dapat disebut dengan *pembauran identifikasi*.

(2). Pemikiran nasionalis berdasarkan persamaan nasib dan cinta tanah air. Pemikiran pembauran ini muncul berdasarkan penelitian dari data sejarah kehidupan Karim Oey yang tidak perlu diragukan lagi di satu sisi dan di sisi lain adanya ketidakpercayaan masyarakat pribumi terhadap minoritas Tionghoa serta keragu-raguan mereka akan sikap nasionalisme yang ditunjukkan minoritas Tionghoa. Ditambah lagi mereka masih dipandang sebagai orang asing yang sulit membaur. Oleh karenanya untuk menjawab keraguan tersebut Karim Oey telah menampakkan pemikiran serta sikap

nasionalis yang tidak dapat ditawar-tawar, dengan tegas ia berani menentang penjajah Belanda serta menolak berdirinya Negara Federal. Apa yang diinginkan Karim Oey dengan pemikiran nasionalisnya adalah untuk menanamkan sikap nasionalis itu pada anggota keluarga, lingkungan masyarakat umumnya serta minoritas Tionghoa khususnya supaya mempunyai pemikiran dan sikap nasionalis. Bila mana pemikiran nasionalis tersebut telah tertanam, maka pada tahap selanjutnya akan merubah pola pikir kelompok mayoritas dengan menganggap kelompok minoritas adalah bagian yang tak terpisahkan dari mayoritas. Pada tahap ini proses pembauran telah sampai pada tahap *Pembauran Prilaku*, yaitu tidak adanya prasangka dan diskriminasi mayoritas terhadap minoritas.

(3). Pemikiran pembauran Karim Oey selanjutnya adalah berpikir terbuka. Maksudnya berpikir terbuka terhadap pribumi dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan gaya hidup eksklusif minoritas Tionghoa terhadap pribumi. Kemudian selanjutnya mengajak minoritas Tionghoa untuk berpikir dan bersikap terbuka sebagai upaya untuk menghilangkan tatanan kehidupan budaya yang membedakan budaya Tionghoa dan budaya pribumi. Dengan harapan tertanam dalam pemikiran-pemikiran minoritas Tionghoa dan pribumi bahwa mereka adalah satu tubuh yang saling membutuhkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bingkai persatuan bangsa Indonesia.

(4). Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui organisasi Karim Oey telah berjasa dalam proses pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia. Karim Oey telah mencetuskan dan mendirikan organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (sekarang Pembina Iman Tauhid Islam disingkat PITI) sebagai wadah dan sarana pembauran. Melalui organisasi ini pula Karim Oey mulai mengaplikasikan pemikiran-pemikiran serta gagasan-gagasannya baik dengan cara dakwah *bi al-lisan*, *bi al-hal*, penyampaian aqidah Islamiyah, persaudaraan (*ukhuwah*) dan saling tolong menolong (*ta'awun*). Adanya lembaga organisasi serta kegiatan seperti di atas adalah sesuatu yang pokok dari tahapan-tahapan pembentukan masyarakat Islam sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap masyarakat Arab ketika itu. Dengan mencontoh apa yang telah dilakukan Nabi dalam membentuk masyarakat Islam melalui 3 tahapan yaitu *takwin*, *tanzhim* dan *taudi'*. Karim Oey mendirikan PITI dengan maksud dan tujuan sebagai sarana pembinaan dan penataan minoritas Tionghoa agar menjadi muslim Tionghoa yang taat dengan melalui 3 tahapan di atas yaitu ;

a). *Takwin* meliputi tahapan penyampaian dan pengenalan ajaran Islam (*internalisasi ajaran Islam*) kepada minoritas Tionghoa melalui dakwah langsung atau dakwah *bi al-lisan*, diharapkan pada tahapan ini dapat menimbulkan rasa persaudaraan, saling tolong menolong antara sesama muslim.

b). *Tanzhim*, yang diinginkan oleh Karim Oey adalah menjadikan lembaga organisasi sebagai tempat pembinaan dan penataan masyarakat minoritas Tionghoa. Tahapan *tanzhim* yaitu penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (*eksternalisasi ajaran Islam*) yang diharapkan muncullah sosok muslim Tionghoa yang taat dalam realitas sosial.

c). *Taudi'*, tahap ini dapat diraih bila seseorang telah melalui dua tahapan sebelumnya secara konsisten, maka diharapkan akan menghasilkan tahapan apa yang disebut Rasulullah SAW dengan *Taudi'*, yaitu tahap keterlepasan dan kemandirian

seseorang atau yang disebut dengan manusia *muttaqin*. Pada tahap ini minoritas muslim Tionghoa telah siap menjadi bagian masyarakat mayoritas. Bila ketiga tahapan ini telah dilalui, bolehlah berharap akan munculnya suatu masyarakat minoritas muslim Tionghoa yang taat, memiliki kualitas keimanan, kualitas wawasan kebangsaan (nasionalisme) yang tidak perlu diragukan lagi dan jiwa pengorbanan yang tinggi terhadap kepentingan Negara dan Bangsa. Pada akhirnya tidak perlu lagi mempermasalahkan pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia.

Kedua, berdasarkan penelitian di atas bahwa pemikiran pembauran Karim Oey hingga saat ini masih sangat relevan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari analisis perbandingan pemikiran pembauran Karim Oey dengan pemikiran pembauran DP. Budi Susetyo, Bung Karno, Umar Kayam, Emil Salim, Fahmi Idris, Sultan Takdir Ali Syahbana dan Yunus Yahya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat dikemukakan persamaan dan perbedaan pemikiran Karim Oey dengan tokoh-tokoh pembauran di atas. Adapun persamaannya sebagai berikut ;

- DP. Budi Susetyo ; Berpijak pada akar permasalahan minoritas Tionghoa di Indonesia tentang identitasnya, yaitu fakta sejarah minoritas Tionghoa yang memiliki problematika pasca penerapan politik *divide et impera* dan *pass and zoning system*. Untuk mengatasi permasalahan pembauran minoritas tersebut, minoritas Tionghoa harus mengidentifikasikan dirinya.
- Bung Karno ; Proses pembauran harus dijalankan atas dasar persamaan nasib dan cinta tanah air, menghilangkan pemikiran dan sikap eksklusif serta stereotipe.
- Umar Kayam ; Menghilangkan stereotipe negatif antara pribumi dan minoritas Tionghoa, karena hal tersebut tercipta dari warisan politik pecah belah Belanda yang merupakan penghambat proses pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia.
- Emil Salim ; Dengan menjalin hubungan yang harmonis antara pribumi dan minoritas Tionghoa, maka akan tercipta sikap nasionalis, persamaan nasib dan cinta tanah air serta sikap terbuka antara keduanya akan mempercepat proses pembauran.
- Yunus Yahya ; Menjadikan dakwah Islamiyah sebagai sarana pembauran, menyampaikan Islam kepada minoritas Tionghoa. Semakin banyak minoritas

Tionghoa memeluk Islam yang menguasai ekonomi, maka dapat memperkuat perekonomian pribumi.

Sedangkan perbedaan-perbedaannya adalah sebagai berikut ;

- DP. Budi Susetyo ; Teori Identitas ; Mengidentifikasi minoritas Tionghoa dalam berbagai modus yang variatif dalam bentuk gerak sosial atau perubahan sosial, seperti mendirikan Partai Tionghoa atau organisasi Persatuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), bergabung dalam Partai Bhineka Tunggal Ika dan atau tergabung dalam Partai PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN) dst.

Karim Oey ; Teori Identitas ; Pengidentifikasian diri minoritas Tionghoa menjadi muslim Tionghoa yang taat atas dasar kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam.

- Umar Kayam ; Sikap frustrasi yang dialami minoritas Tionghoa adalah akumulasi dari perlakuan diskriminatif yang merupakan salah satu penghambat pembauran.

Karim Oey ; Sikap frustrasi yang dialami minoritas Tionghoa bukan dari akumulasi perlakuan diskriminatif melainkan stereotip negatif-lah sebagai penghambat pembauran.

- Emil Salim ; Mayoritas pribumi harus mengidentifikasikan dirinya dengan minoritas Tionghoa dengan cara mengambil sikap positif yang ada pada minoritas tersebut.

Karim Oey ; Sebaliknya menurut Karim Oey, justru minoritas Tionghoa harus mengidentifikasikan dirinya dengan mayoritas pribumi, dengan memeluk agama Islam yaitu agama yang dipeluk oleh mayoritas.

Saran-saran

Pelbagai kesimpulan di atas, berkaitan dengan penelitian terhadap sejarah dan perjuangan Karim Oey dalam upaya pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia ini, maka bagi para peneliti yang bergelut dalam dunia kesejarahan dan ingin mengkaji secara lebih mendalam dan serius terhadap berbagai bentuk pemikirannya, maka dengan ini disarankan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bukanlah sesuatu yang final dan mutlak, masih banyak masalah-masalah lain yang dapat dikaji dari pribadi Karim Oey. Penelitian ini baru sebagian

kecil dari gagasan besarnya terhadap pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia dan itupun belum sempurna. Salah satu hal penting untuk diketahui bahwa Karim Oey adalah seorang praktisi bukan pemikir yang dapat secara langsung menuliskan atau mengarsipkan pemikirannya dalam sebuah buku yang kreatif atau rekaman-rekaman lain.

2. Berbicara masalah pembauran tidak akan ada kata habis atau selesai, karena masih menyisakan banyak problematika, khususnya standarisasi kebutuhan etnis, kelompok atau golongan. Semua membutuhkan suatu proses panjang yang tidak dapat diukur dengan ruang, waktu dan tempat. Oleh karena itu terkait dengan upaya pembauran sebagai salah satu gerakan yang diimplementasikan dalam proses kehidupan sehari-hari menuju kepribadian muslim secara kaffah atau muslim taat, sudah barang tentu membutuhkan pengkajian dan penelaahan lebih lanjut. Agar dapat mengikuti gerak maju perubahan zaman sehingga tidak tertinggal dan termakan oleh zaman itu sendiri. Untuk itu, dibutuhkan penelitian berkesinambungan secara komprehensif dan rasional yang bersandar pada para pemikir-pemikir yang pakar di bidang sosiologi, budaya, sejarah, hukum dan politik, yang selalu berkaitan dengan upaya pembauran.
3. Diharapkan adanya upaya-upaya mencari format baru yang tepat dalam memecahkan permasalahan pembauran minoritas Tionghoa di Indonesia baik dalam bidang politik, sosial maupun hukum.

Rekomendasi

Kesadaran bahwa penelitian ini perlu dilanjutkan maka, dengan ini peneliti mengajukan beberapa hal yang patut untuk ditindaklanjuti yaitu :

1. Peran Karim Oey dalam membela bangsa Indonesia.
2. Pengaruh kebijakan politik Belanda terhadap Minoritas Tionghoa di Indonesia.

3. Muslim Tionghoa di Indonesia dalam Perspektif Pembauran.
4. Analisis Peranan Minoritas Tionghoa dalam Bidang Ekonomi di Indonesia.
5. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru Terhadap Minoritas Tionghoa (Studi Analisis-Komperatif).
6. Studi Analisis Peranan PITI dalam Upaya Dakwah Islamiyah di Indonesia.